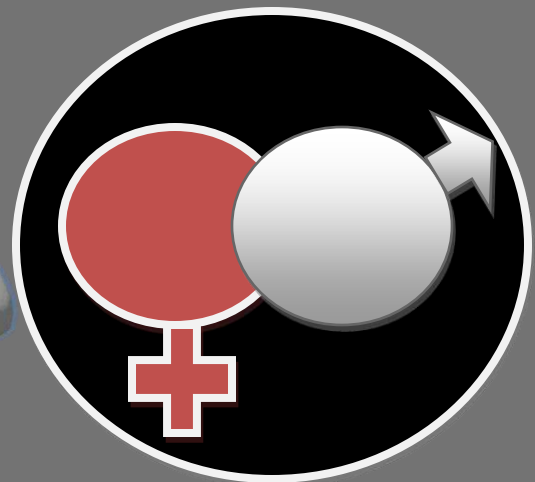


2023



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

PROFIL GENDER DAN ANAK DATA TERPILAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK





Profil Gender Terpilah Kabupaten Buleleng



Profil Gender Terpilah Kabupaten Buleleng

PENYUSUN PROFIL GENDER TERPILAH KABUPATEN BULELENG


- Penanggungjawab : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
- Penyusun : Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak

Mengetahui
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak,



Y I Nyoman Riang Gustaka, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19750218199311 1 001

Singaraja, 29 Desember 2023
Penyusun,
Bidang Perlindungan
Perempuan dan Anak



Putu Agustini, SST/Keb.M.A.P.
Pembina (IV/a)
NIP. 19740812 199212 2 001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa/Ida Hyang Widhi Wasa berkat rahmatNya kami dapat menyelesaikan “Profil Gender Terpilah Kabupaten Buleleng Tahun 2023” sesuai rencana. Secara umum penyusunan buku Profil Gender ini bertujuan untuk menyajikan data statistik yang terpilah berdasarkan jenis kelamin di berbagai aspek pembangunan, seperti aspek pendidikan, kesehatan, kegiatan ekokomi, serta masalah sosial lainnya. Penulisan Profil Gender ini dibuat secara deskriptif, dan sejauh mungkin memperlihatkan isu gender di setiap babnya. Berdasarkan data-data yang ada dalam buku ini, para pembaca khususnya para penentu kebijakan akan dapat menemukan isu-isu gender yang ada pada masing-masing sektor pembangunan. Atas dasar ini mereka nantinya akan dapat menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan isu yang ada sehingga pada gilirannya tujuan pembangunan secara umum dan khususnya pembangunan pemberdayaan perempuan menuju kesetaraan dan keadilan gender dapat cepat terwujud.

Manfaat khusus dari penyusunan buku Profil Gender Kabupaten Buleleng ini antara lain adalah dapat memberikan petunjuk atau referensi bagi para penentu kebijakan dan penyusun program pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) terutama dalam menyusun kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga kegiatan yang direncanakan dapat menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran. Ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin merupakan dasar dalam melakukan analisis gender sehingga para perencana mampu menyusun kebijakan/program/kegiatan serta anggaran pembangunan yang responsif gender. Hal ini pada akhirnya akan dapat mempercepat pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) di segala bidang pembangunan sehingga kesenjangan gender lebih cepat bisa diatasi.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Penyusun dan semua pihak atas bantuan dan kerjasama yang baik dalam penyusunan Profil ini, sehingga “Profil Gender Terpilah Kabupaten Buleleng Tahun 2023” dapat diselesaikan sesuai rencana.

Singaraja, 29 Desember 2023

Penyusun “Profil Gender Terpilah Kabupaten

Buleleng Tahun 2023”

Penanggungjawab,



I Nyoman Riang Pustaka, S.IP

Pembina Utama muda (IV/C)

NIP. 19750218199311 1 001



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PENYUSUN	i	
KATA PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1 Latar belakang	I-1
	1.2 Tujuan	I-2
BAB II	GAMBARAN UMUM KABUPATEN BULELENG	
	2.1 Kondisi Geografis	II-1
	2.2 Kondisi Demografis	II-2
	2.3 Prioritas Pembangunan	II-15
BAB III	GENDER, KONSEP DAN TEORI	III-1
	3.1 Gender dan Jenis kelamin	III-1
	3.2 Kesetaraan dan Keadilan Gender	III-6
	3.3 Pengarusutamaan Gender	III-10
BAB IV	GENDER DALAM BIDANG PENDIDIKAN	IV-1
	4.1 Angka Partisipasi Murni	IV-1
	4.2 Angka Partisipasi Kasar	IV-5
	4.3 Jumlah Siswa	IV-8
	4.4 Siswa Putus Sekolah	IV-10
	4.5 Jumlah Guru	IV-13
	4.6 Guru Bersertifikat Pendidik	IV-15
BAB V	GENDER DALAM BIDANG KESEHATAN	V-1
	5.1 Gender Pada Pemberian ASI Bayi	V-1
	5.2 Gender Pada Pelayanan Kesehatan Balita	V-2
	5.3 Peserta Keluarga Berencana Aktif	V-4
	5.4 Gender Pada Tenaga Medis	V-4
BAB VI	GENDER DALAM KEGIATAN EKONOMI	VI-1
	6.1 Mata Pencaharian Penduduk	VI-1
	6.2 Kepemilikan Usaha	VI-2
	6.3 Tenaga Kerja Indonesia	VI-4
BAB VII	GENDER DALAM BIDANG PEMERINTAHAN	VII-1
	7.1 Gender Pada Legislatif dan Penyelenggara Pemilu	VII-1
	7.2 Gender Pada ASN di Kabupaten Buleleng	VII-2



Profil Gender Terpilah Kabupaten Buleleng

7.3	Gender Pada Instansi Vertikal di Kabupaten Buleleng	VII-3
BAB VIII	ISU GENDER LAIN	VIII-1
BAB 1X	PENUTUP	IX-1
9.1	Simpulan	IX-1
9.2	Rekomendasi	IX-3

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Profil gender yang memuat data gender terpilah sangat penting. Data gender terpilah itu dimanfaatkan untuk analisis gender sehingga bisa diperoleh isu-isu gender berupa ketimpangan atau ketidakadilan gender pada berbagai bidang sesuai dengan analisis atas data gender terpilah. Berdasarkan isu-isu gender hasil analisis itu dapat dibuat strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan atau keadilan gender.

Perhatian dunia terhadap isu gender nampaknya cukup serius, terbukti dengan dimasukkannya persoalan gender sebagai salah satu bagian dari delapan kesepakatan *Millenium Development Goals (SDGs)* yang kemudian berlanjut ke *sustainable Development Goals (SDGs)*. Secara historis, wacana gender mulai muncul ke permukaan sekitar tahun 1940-an yang digagas oleh kaum feminis di dunia barat, kemudian mulai mencuat sekitar tahun 1977 ketika kelompok feminis di London tidak lagi memakai isu-isu lama seperti *patriarchat* atau *sexist* dalam membahas hubungan laki-laki dan perempuan. Ini merupakan perkembangan yang cerdas, karena sebenarnya masalah ketidaksetaraan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagian besar dibentuk oleh perbedaan konstruksi “perempuan” dan “laki-laki” secara sosial budaya, dan bukan secara biologis (seks atau kelamin). Oleh karena itu, pemindahan wacana ketidaksetaraan tersebut dari ranah biologis ke ranah sosial budaya/gender secara teoretis lebih efektif (Nugroho, 2008; x). Selanjutnya hal ini menjadi semakin menarik perhatian banyak ilmuwan sosial khususnya kaum feminis. Perhatian kaum feminis terhadap persoalan gender dan perempuan disebabkan oleh masih



adanya ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara.

Eksistensi perempuan di dalam masyarakat masih dipandang sebagai warga kelas dua, sehingga mereka masih menduduki posisi subordinat dan termarjinal. Posisi demikian ini kurang menguntungkan bagi kaum perempuan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh kaum feminis baik di dunia barat maupun di Indonesia.

Di Indonesia salah seorang pejuang nasib kaum perempuan yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat adalah Raden Ajeng Kartini. Perjuangan Raden Ajeng Kartini tidak berhenti meskipun ia telah tiada. Cita-citanya ditindaklanjuti oleh tokoh-tokoh perempuan Indonesia lainnya yang memiliki visi serupa dengan Kartini misalnya R.A Sitinah Joyopranoto, Rr. Rukmini dan lain-lain.

Perjuangan hak perempuan di Indonesia dimulai oleh perjuangan Kartini yang merupakan embrio perjuangan perempuan di Indonesia. Terbentuknya berbagai organisasi perempuan yang mempunyai visi memperbaiki status kaum perempuan melalui berbagai upaya seperti peningkatan pendidikan dan ketrampilan, perlindungan hukum dan lain-lain merupakan bentuk pergerakan perempuan pasca Kartini. Pada era berikutnya organisasi perempuan ini menyelenggarakan kongres perempuan pertama pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta dan kongres ini merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi pergerakan perempuan Indonesia. Namun demikian selama setengah abad dari pelaksanaan kongres ini, pergerakan perempuan Indonesia belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, meskipun setelah merdeka persamaan hak, kesempatan dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan telah tertuang dalam pasal 27 UUD 1945.

Saat ini secara normatif baik dalam Undang-undang Dasar 1945 maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) saat ini telah tercantum adanya hak, kewajiban dan kesempatan yang sama antara kaum laki-laki dan perempuan dalam segala aspek pembangunan. Disamping itu pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi *International Labour Organizatin* (ILO) No.III dengan UU No. 80 tahun 1957 tentang pengupahan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam jenis pekerjaan yang sama nilainya dan pemerintah



Indonesia juga dengan UU.No.7 tahun 1984 telah meratifikasi konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW).

Kebijakan dan strategi pembangunan mulai dari *Women in Development (WID)*, *Women and Development (WAD)* *Gender and Developmen (GAD)* dan *Gender Mainstreaming (GM)* yang diikuti oleg strategi pengarusutamaan gender melalui Inpres No. 9 tahun 2000 telah ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) di masyarakat. Kesetaraan dan keadilan Gender menjadi Visi dari pembangunan pemberdayaan Perempuan. Namun demikian, apa yang telah diupayakan oleh pemerintah Indonesia sejak tiga dasa warsa lebih nampaknya belum menampakan hasil yang maksimal. Hal ini tercermin dari kenyataan yang masih terjadi di masyarakat Bali pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Buleleng di mana ketimpangan gender pada beberapa bidang pembangunan seperti di bidang pendidikan, ketenagakerjaan termasuk di bidang pariwisata, masih relatif menonjol.

Munculnya permasalahan perempuan dan isu gender di masyarakat pada dasarnya disebabkan adanya konstruksi sosial budaya yang meletakkan peran laki-laki dan perempuan secara berbeda-beda yang didasarkan pada pemahaman perbedaan biologis dan fisiologis dari laki-laki dan perempuan. Ideologi gender yang berkembang dan dipahami di masyarakat telah menentukan bahwa ranah domestik adalah dunianya perempuan sedangkan ranah publik menjadi dunianya laki-laki. Dikotomi peran yang demikian yang kemudian diiringi dengan munculnya budaya patriarki cenderung menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perlakuan seperti perlakuan diskriminatif yang kurang menguntungkan bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender yang demikian (Arjani, 2003) pada beberapa aspek kehidupan di masyarakat mengakibatkan terjadinya ketimpangan gender.

Pada saat ini di tingkat Provinsi dan Kabupaten telah terbentuk struktur kelembagaan yang khusus menangani pemberdayaan perempuan, sebagai wujud komitmen pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani masalah perempuan. Di tingkat Provinsi Bali sejak pertengahan tahun 2008 bagian Pemberdayaan Perempuan telah di ubah statusnya menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sementara itu di Kabupaten Buleleng juga telah berubah dari awalnya sub bagian menjadi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Meskipun lembaga khusus yang menangani peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) telah dibentuk lengkap dengan kebijakan dan program-programnya, bukan berarti KKG ideal



dapat dicapai dengan mudah. Seperti telah disinggung di atas bahwa permasalahan KKG masih terjadi di masyarakat terlihat lebih jelas.

Belum tercapainya KKG bisa dilihat dengan masih terjadinya kesenjangan gender di berbagai sektor pembangunan. Untuk memberi gambaran secara lebih nyata tentang kesenjangan gender yang masih terjadi sangat diperlukan bukti-bukti berupa data pendukung yang terpublikasi dalam bentuk buku Profil Gender Terpilah. Dengan demikian akan dapat diketahui secara lebih jelas kesenjangan yang terjadi yang pada gilirannya dapat memberikan petunjuk secara jelas kepada para penentu kebijakan dan penyusun program. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin yang ada pada buku Profil Gender dapat dipakai dasar dalam penyusunan kebijakan/program/kegiatan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). Jika para perencana sudah mampu menyusun PPRG berlandaskan pada data riil yang ada di Kabupaten Buleleng, maka dapat dipastikan strategi pengarusutamaan gender dapat di aplikasikan secara cepat. Ini pada gilirannya akan dapat mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Selain itu, untuk memotivasi semangat daerah dalam mencapai KKG, maka pemerintah Indonesia memberikan penghargaan berupa Anugrah Parahita Ekapraya yang biasanya diserahkan langsung oleh Presiden setiap tanggal 22 Desember bertepatan dengan perayaan hari Ibu. Untuk kepentingan Anugrah Parahita Ekapraya, maka adanya data terpilah menurut jenis kelamin yang tertuang dalam bentuk buku Profil Gender merupakan salah satu persyaratannya.

1.2.Maksud Dan Tujuan

1.2.1. Tujuan Umum

Secara umum penyusunan buku Profil Gender ini bertujuan untuk menyajikan data statistik yang terpilah berdasarkan jenis kelamin di berbagai aspek pembangunan, seperti aspek pendidikan, kesehatan, kegiatan ekokomi, serta masalah sosial lainnya. Penulisan Profil Gender ini dibuat secara deskriptif, dan sejauh mungkin memperlihatkan isu gender di setiap babnya. Berdasarkan data-data yang ada dalam buku ini, para pembaca khususnya para penentu kebijakan akan dapat menemukan isu-isu gender yang ada pada masing-masing sektor pembangunan. Atas dasar ini mereka nantinya akan dapat menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan isu yang ada sehingga pada gilirannya tujuan pembangunan secara umum dan khususnya pembangunan pemberdayaan perempuan menuju kesetaraan dan keadilan gender dapat cepat terwujud.



1.2.2. Tujuan Khusus

Manfaat khusus dari penyusunan buku Profil Gender Kabupaten Buleleng ini antara lain adalah dapat memberikan petunjuk atau referensi bagi para penentu kebijakan dan penyusun program pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) terutama dalam menyusun kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga kegiatan yang direncanakan dapat menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran. Ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin merupakan dasar dalam melakukan analisis gender sehingga para perencana mampu menyusun kebijakan/program/kegiatan serta anggaran pembangunan yang responsif gender. Hal ini pada akhirnya akan dapat mempercepat pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) di segala bidang pembangunan sehingga kesenjangan gender lebih cepat bisa diatasi.



2.1.2 Luas Wilayah

Kabupaten Buleleng memiliki wilayah yang paling luas diantara 9 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali, yaitu 1.365,88 km² (24,25% dari luas Provinsi Bali), dengan panjang pantai ± 157,05 km. Secara administrasi terdiri dari 9 Kecamatan, 19 Kelurahan, 129 Desa dan 169 Desa Pakraman/Desa Adat, dengan luas wilayah masing-masing kecamatan sebagai berikut :

Kecamatan Gerokgak :	356,57	Km ²	atau	26,11%;
Kecamatan Busungbiu:	196,62	Km ²	atau	14,40%;
Kecamatan Sukasada :	172,93	Km ²	atau	12,66%;
Kecamatan Banjar :	172,60	Km ²	atau	12,64%;
Kecamatan Kubutambahan:	118,24	Km ²	atau	8,66%;
Kecamatan Seririt :	111,78	Km ²	atau	8,18%;
Kecamatan Tejakula :	97,68	Km ²	atau	7,15%;
Kecamatan Sawan :	92,52	Km ²	atau	6,77%;
Kecamatan Buleleng :	46,94	Km ²	atau	3,44%.

2.1.3 Topografi

Wilayah Kabupaten Buleleng yang membujur dari barat ke timur memiliki topografi yang sangat unik dibandingkan daerah lainnya di Bali, dapat diidentifikasi bahwa di bagian selatan merupakan wilayah dengan topografi yang sebagian besar pegunungan dan perbukitan, sedangkan di bagian utara merupakan wilayah dataran di sepanjang pantai dari timur ke barat. Dilihat dari kondisi morfologi atau topografi daerah Buleleng, sebagian luas lahannya 70.226 Ha (51,41%) merupakan daerah landai, sebagian lagi 21.462,75 Ha (15,71%) daerah miring dan 32.643,50 Ha (23,89%) daerah terjal, sisanya 12.264,75 Ha (8,98%) daerah datar.

Kondisi topografi yang demikian ini melahirkan sebutan lain untuk wilayah Buleleng yaitu “*Nyegara-Gunung*” yang mengindikasikan begitu menyatunya antara pegunungan dan pantai/laut. Diantara perbukitan yang membentang di bagian selatan tersebut terdapat gunung yang bukan gunung berapi. Gunung yang tertinggi adalah Gunung Tapak (1.903 m) berada di Kecamatan Sukasada dan yang terendah Gunung Jae (222 m) di Kecamatan Gerokgak. Berdasarkan kondisi morfologi atau topografi daerah Buleleng, sebagian luas lahannya atau seluas 70.226 Ha (51,41%) merupakan daerah berbukit/pegunungan.



2.2 Kondisi Demografis

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan karena yang paling berperan dalam pembangunan adalah penduduk sebagai subyek sekaligus obyek. Apabila tidak dikelola dengan baik jumlah penduduk dapat menimbulkan masalah tersendiri dan menjadi beban pembangunan.

2.2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya.

Perkembangan penduduk di Kabupaten Buleleng selama ini menunjukkan peningkatan, dapat dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2021 adalah 801.324 jiwa, dengan komposisi 402.754 jiwa laki-laki dan 398.570 jiwa perempuan dengan sex ratio 101,07 (BPS Kecamatan dalam Angka, Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2022 Kementerian dalam Negeri,(diolah), pada tahun 2022 jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng 827.981 jiwa dengan komposisi 417.065 laki-laki dan 410.916 perempuan dengan sex ratio 101.50. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Buleleng pada tahun 2021-2022 mencapai 2.38 % (Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2022).

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir seperti disajikan pada tabel 2.1.



Tabel 2.1
Laju pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2022

Statistik Kunci, 2020–2022
Key Statistics, 2020–2022

Rincian/Description	Satuan/Unit	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/SOCIAL				
Penduduk ^{1,9} /Population ^{1,9}	ribu/thousand	791,81 ⁹	806,65 ⁹	825,14 ⁹
Laju Pertumbuhan Penduduk ¹ /Population Growth ¹	%	2,33	2,51	2,38
Angka Harapan Hidup ^{1-e} /Life Expectancy Rate ¹	tahun/years	71,83	71,95	72,32
Angka Melek Huruf Usia 15+/ <i>Literacy Rate Aged 15+</i>	%	92,13	83,72	95,31
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK ^{2,3} <i>Labour Force Participation Rate-LFPR^{2,3}</i>	%	75,07	73,08	75,38
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT ² <i>Unemployment Rate-UR²</i>	%	5,19	5,38	5,20
Penduduk Miskin ² /Poor People ⁴	ribu/thousand	35,25	40,92	41,68
Persentase Penduduk Miskin ⁴ <i>Percentage of Poor People⁴</i>	%	5,32	6,12	6,21
Indeks Pembangunan Manusia-IPM ⁵ <i>Human Development Index⁵</i>		72,55	72,56	73,45
EKONOMI/ECONOMIC				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku ⁶ <i>Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price⁶</i>	miliar rupiah <i>billion rupiahs</i>	33.302,72	33.363,29	35.805,28
Laju Pertumbuhan Ekonomi ⁹ /Economic Growth ⁷	%	-5,80	-1,27	3,11
PDRB Per Kapita Harga Berlaku ^{6,8} <i>Per Capita of GRDP at Current Price^{6,8}</i>	miliar rupiah <i>billion rupiahs</i>

Catatan/Notes: ¹ Hasil proyeksi penduduk Indonesia 2010–2035 (pertengahan tahun/Juni)/The result of Indonesia population projection 2010–2035 (mid year/June)

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng

Tabel 2.2
Kepadatan Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2021-2022

No	Tahun	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	2	3
1	2021	591
2	2022	604

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng

Kepadatan penduduk kabupaten Buleleng tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan dari 591 jiwa/km² tahun 2021 menjadi 604 jiwa /km² ditahun 2022. Pertumbuhan penduduk ini selain dikarenakan adanya fertilitas (pertumbuhan penduduk alami), juga disebabkan adanya pertumbuhan penduduk migrasi, dimana terdapat migrasi masuk yang berpengaruh sangat signifikan terhadap pertumbuhan penduduk di Kabupaten Buleleng. Jumlah penduduk tersebut mendiami wilayah seluas 1.365,88.km² Adapun rincian jumlah dan komposisi penduduk Kabupaten Buleleng dapat diuraikan pada tabel 2.3



Tabel 2.3
Jumlah dan Komposisi Penduduk Kabupaten Buleleng
Tahun 2022 (000 jiwa)

No.	KECAMATAN	LAKI (Jiwa)	PEREMPUAN (Jiwa)	JUMLAH (Jiwa)	SEX RATIO (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Gerokgak	51.765	51.243	103.008	101.02
2.	Seririt	47.463	47.679	95.142	99.55
3.	Busungbiu	26.993	26.560	53.553	101.63
4.	Banjar	44.488	43.856	88.344	101.44
5.	Sukasada	47.299	46.795	94.094	101.08
6.	Buleleng	78.046	76.979	155.025	101.39
7.	Sawan	43.123	42.446	85.569	101.59
8.	Kubutambahan	37.666	36.491	74.157	103.22
9.	Tejakula	40.222	38.867	79.089	103.49
	Kab.Buleleng	417.065	410.916	827.981	101.50

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng

2.2.2 Tenaga Kerja

Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka secara tidak langsung menuntut penyediaan lapangan kerja. Berdasarkan keadaan pada tahun 2022, Angkatan Kerja di Kabupaten Buleleng berumur 15 tahun keatas menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin 371.334 orang yang terdiri dari 205.904 laki-laki dan 165.430 perempuan.

Tabel 2.4

Tabel 3.2.3
Table 3.2.3
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buleleng, 2022
Population 15 Years of Age and Over who Worked During The Previous Week by Main Employment Status and Sex in Buleleng Regency, 2022

Status Pekerjaan Utama Main Employment Status	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri Own account worker	30 403	31 917	62 320
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar Employer assisted by temporary worker/unpaid worker	42 242	27 362	69 604
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar Employer assisted by permanent worker/paid worker	8 765	1 188	9 953
Buruh/Karyawan/Pegawai/Employee	63 049	36 711	99 760
Pekerja bebas casual worker	46 377	17 878	64 255
Pekerja keluarga/tak dibayar Family worker/unpaid worker	15 068	50 374	65 442
Jumlah/Total	205 904	165 430	371 334

Catatan/Note: ...
Sumber/Source: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey



2.2.3 Angka Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multi dimensi. Kemiskinan terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti : faktor kultural, alamiah, dan struktural serta adanya ketidakmampuan untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan yang lain-lainnya.

Kemiskinan sudah menjadi permasalahan nasional dan bahkan internasional, Pemerintah Kabupaten Buleleng terus berkomitmen dan berupaya untuk menguranginya melalui upaya-upaya sistematis dan berkelanjutan. Kompleksnya permasalahan kemiskinan, menjadikan kemiskinan tersebut belum dapat terentaskan keseluruhan. Kompleksitas kemiskinan tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi (kebijakan ekonomi), kondisi politik serta keamanan dan ketertiban suatu bangsa maupun daerah.

Data jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali tahun 2021-2022 di sajikan pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Buleleng
Provinsi Bali Tahun 2021-2022

Tahun	Penduduk Miskin di Buleleng		Penduduk Miskin di Bali	
	Jumlah (Ribuan Jiwa)	%	Jumlah (Ribuan Jiwa)	%
1	2	3	4	5
2021	40,92	6.12	201,97	4.53
2022	41,68	6.21	205,68	4.57

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng

2.2.4 Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Adanya pertumbuhan ekonomi positif menunjukkan adanya peningkatan produksi disuatu daerah pada periode waktu tertentu. Peningkatan produksi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Bali, Buleleng mempunyai sumber daya alam yang melimpah sehingga memiliki peluang yang cukup besar untuk tumbuh dan mengembangkan berbagai sektor perekonomian. Permasalahan terbesar terletak pada kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki, meskipun banyak kesempatan kerja yang diciptakan, bila kualitas SDM lebih rendah dan tidak dapat memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan oleh lapangan kerja yang ada maka lambat



laun SDM tidak akan mampu mengakses peluang yang ada, dan peluang kerja akan diisi oleh para pendatang.

Selama tiga tahun terakhir IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Buleleng menunjukkan peningkatan, yaitu pada tahun 2021 sebesar 72,56, tahun 2022 meningkat menjadi 73,45, tahun 2023 meningkat menjadi 73,97. Angka IPM tersebut secara eksplisit menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

2.2.5 Potensi Unggulan Daerah

Potensi unggulan daerah umumnya ditentukan berdasarkan pada kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Ukuran yang digunakan adalah besarnya kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB. Dikatakan potensi unggulan apabila kontribusinya terhadap nilai PDRB konsisten dari waktu ke waktu dan memiliki kemampuan bersaing dibandingkan daerah lain.

Potensi unggulan yang ada di Kabupaten Buleleng dapat di kelompokkan menjadi beberapa produk unggulan yaitu :

1. Pertanian, terdiri dari mangga, pisang dan durian;
2. Perkebunan, terdiri dari kopi robusta;
3. Peternakan, terdiri dari sapi dan babi;
4. Perikanan, terdiri dari ikan kerapu, ikan bandeng;
5. Industri kecil/kerajinan, terdiri dari anyaman inovatif dan anyaman bambu.

2.3 Prioritas Pembangunan

Visi, misi dan sasaran pokok pembangunan menjadi acuan dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah. Selain itu dalam merumuskan prioritas pembangunan juga melihat pada prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan juga prioritas dan sasaran Propinsi Bali, pencapaian SDGs, Standar Pelayanan Minimal, target pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur serta reformasi birokrasi dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari prioritas pembangunan Buleleng, nampak pencapaian SDGs yang memuat pengarusutamaan gender menjadi salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Buleleng.



BAB III GENDER: KONSEP DAN TEORI

3.1 Gender dan Jenis Kelamin

Kata gender berasal dari kata bahasa Latin *genus* yang berarti tipe atau jenis. Jika makna itu dikaitkan dengan eksistensi manusia, maka ada dua jenis manusia berdasarkan jenis kelamin yang dimiliki yaitu, laki-laki dan perempuan. Dua jenis manusia laki-laki dan perempuan memang berbeda. Perbedaan itu ada yang bersifat alamiah atau biologis (*nature*), dan ada yang bersifat sosial-budaya (*culture*). Perbedaan laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi sosial-budaya, yang bisa berubah dari suatu tempat ke tempat lain dan dari suatu waktu ke waktu lainnya disebut gender.

Secara alamiah atau biologis laki-laki dan perempuan memang memiliki tugas dan peran alamiah yang berbeda karena kelengkapan biologis yang dimiliki. Laki-laki memiliki kelengkapan biologis berupa penis dan sperma, memiliki tugas alamiah membuahi. Sedangkan perempuan memiliki indung telur, rahim, vagina, dan payudara, memiliki tugas, (setelah indung telur dibuahi oleh laki-laki), hamil, mengandung janin, melahirkan anak, menyusui dan merawat bayi. Tugas alamiah laki-laki dan perempuan karena kelengkapan biologis yang dimiliki itu, tidak berubah menurut tempat dan waktu. Itu dapat disebut kodrat. Kodrat itu tidak dapat digugat sebagai tidak setara dan tidak adil bagi siapapun, laki-laki maupun perempuan.

Namun, sejumlah kebudayaan memberikan *stereotype* kepada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dipandang kuat, rasional, mampu melindungi dan lainnya. Sedangkan perempuan dipandang lemah lembut, emosional, sabar, butuh perlindungan dan lainnya. Karena itu kemudian laki-laki diberi tugas sebagai kepala keluarga, mencari nafkah ke sektor publik. Sedangkan perempuan diberi tugas di sektor domestik, mendidik anak di rumah, mengurus rumah, dan



melayani suami. Kebudayaan tertentu lebih spesifik menyebutkan tugas perempuan berada di sekitaran sumur, dapur, dan kasur. *Stereotype* dan tugas laki-laki dan perempuan seperti ini merupakan konstruksi sosial-budaya yang dapat berubah menurut tempat dan waktu, tidak dapat disebut sebagai kodrat. *Stereotype* tugas laki-laki dan perempuan bentukan sosial-budaya ini, di tempat dan waktu yang berbeda bisa saja digugat karena dipandang tidak setara dan tidak adil.

3.1.1 Gender Menurut Definisi Para Ahli

Persoalan gender mendapat perhatian para ahli karena muncul isu-isu gender yang disuarakan oleh kaum perempuan yang merasa mendapat perlakuan tidak setara dan tidak adil. Seandainya kaum perempuan menerima saja peran yang ditambahkan oleh kebudayaan kepada peran yang merupakan kodrat, maka tidak akan ada yang mempersoalkan gender. Karena gugatan kaum perempuanlah para ahli mengkaji persoalan gender.

Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Perubahan ciri dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep gender (Fakih, 2006: 71).

Gender dan jenis kelamin memiliki perbedaan dari segi dimensi. Istilah jenis kelamin mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial-budaya seorang laki-laki dan perempuan (Santrock, 2003: 365).

Gender diartikan sebagai konstruksi sosiokultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminim. Gender berbeda dari seks dan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Istilah gender dikemukakan oleh para ilmuwan sosial dengan maksud untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang mempunyai sifat bawaan (ciptaan Tuhan) dan bentukan budaya (konstruksi sosial). Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman (Abdullah, 2003: 19).

Pengertian gender disandingkan dengan jenis kelamin dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 3.1



Pengertian Gender dengan Jenis Kelamin

No	Gender	Jenis Kelamin
1	2	3
1	Menyangkut perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil bentukan masyarakat.	Menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan, khususnya pada bagian-bagian alat reproduksi.
2	Peran sosial budaya dapat berubah: Peran istri sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi pencari nafkah, di samping menjadi istri juga.	Peran reproduksi tidak dapat berubah: Sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan dan sebaliknya.
3	Peran sosial dapat dipertukarkan: Untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami tidak memiliki pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumah tangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah ke luar rumah bahkan sampai ke luar negeri.	Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan: tidak mungkin laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi.
4	Peran sosial bergantung pada masa dan keadaan.	Peran reproduksi kesehatan berlaku sepanjang masa.
5	Peran sosial bergantung pada budaya masyarakat tertentu.	Peran reproduksi kesehatan berlaku di mana saja.
6	Peran sosial berbeda antara satu kelas/strata sosial dengan strata lainnya.	Peran reproduksi kesehatan berlaku bagi semua kelas/strata sosial.
7	Peran sosial bukan kodrat Tuhan tetapi buatan manusia	Peran reproduksi berasal dari Tuhan atau kodrat.

3.1.2 Gender dalam Kajian Teori

Ada sejumlah teori sosial yang dapat menjelaskan persoalan gender. Menurut teori *nurture* adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakekatnya adalah bentukan masyarakat melalui



konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas *borjuis*, dan perempuan sebagai *proletar*. Konstruksi sosial yang dirasakan tidak adil bagi perempuan ini mendorong perempuan memperjuangkan statusnya.

Perjuangan untuk persamaan hak ini dipelopori oleh kaum feminis internasional yang cenderung mengejar kesamaan (*sameness*) dengan konsep *fifty-fifty*, konsep yang kemudian dikenal dengan istilah *perfect equality* secara kuantitas. Perjuangan tersebut sulit dicapai karena berbagai hambatan baik dari nilai agama maupun budaya. Berangkat dari kenyataan tersebut, para feminis berjuang dengan menggunakan pendekatan sosial konflik, yaitu konsep yang diilhami Karl Mark (1818-1883) dan Machiavvelli (1469-1527) dilanjutkan oleh David Lockwood (1957) dengan tetap menerapkan konsep dialektika.

Karena itu aliran *nurture* melahirkan paham sosial konflik yang banyak dianut masyarakat sosialis komunis yang menghilangkan strata penduduk. Paham sosial konflik memperjuangkan kesamaan proporsional (*perfect equality*) dalam segala aktivitas masyarakat misalnya, pimpinan partai politik, DPR, Militer, Menteri, Gubernur, Pilot, dan Manajer.

Menurut teori *nature*, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrati, sehingga harus diterima apa adanya. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada tugas yang memang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan secara kodrat alamiahnya. Dalam proses pengembangannya banyak kaum perempuan sadar terhadap beberapa kelemahan teori *nurture* di atas. Lalu beralih ke teori *nature*. Pendekatan *nurture* dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat.

Perbedaan biologis diyakini memiliki pengaruh pada peran yang bersifat naluri (*instinct*). Perjuangan kelas tidak pernah mencapai hasil yang memuaskan karena manusia memerlukan kemitraan dan kerjasama secara struktural dan fungsional. Manusia baik perempuan maupun laki-laki memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam kehidupan sosial



ada pembagian tugas, begitu pula dalam kehidupan keluarga. Harus ada kesepakatan antara suami istri, siapa yang menjadi kepala keluarga dan siapa yang menjadi ibu rumah tangga. Dalam organisasi sosial juga dikenal ada pimpinan dan ada bawahan (anggota) yang masing-masing mempunyai tugas, fungsi dan kewajiban yang berbeda dalam mencapai tujuan.

Talcott Parson (1902-1979) dan Parson & Bales berpendapat bahwa keluarga adalah sebagai unit sosial yang memberikan perbedaan peran suami dan istri untuk saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain. Karena itu peranan keluarga semakin penting dalam masyarakat modern terutama dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Keharmonisan hidup hanya dapat diciptakan bila terjadi pembagian peran dan tugas yang serasi antara perempuan dan laki-laki, dan hal ini dimulai sejak dini melalui Pola Pendidikan dan pengasuhan anak dalam keluarga. Aliran ini melahirkan paham struktural fungsional yang menerima perbedaan peran, asal dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh kesempatan (komitmen) dalam kehidupan masyarakat.

Teori Equilibrium menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Hubungan di antara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain.

Teori Struktural-Fungsional, muncul di tahun 1930-an sebagai kritik terhadap teori evolusi. Teori ini mengemukakan tentang bagaimana memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang saling berkaitan. Teori ini mengakui adanya keanekaragaman dalam kehidupan sosial. Dalam kondisi seperti itu, dibuatlah suatu sistem yang dilandaskan pada konsensus nilai-nilai agar terjadi adanya interrelasi yang demi sesuatu yang dinamakan harmoni, stabilitas dan keseimbangan (*equilibrium*). Sistem ini mensyaratkan aktor dalam jumlah memadai, sehingga fungsi seseorang dalam sistem menentukan tercapainya stabilitas atau harmoni tersebut. Ini berlaku untuk sistem sosial: agama, pendidikan, struktur politik, sampai rumah tangga, dalam hal ini termasuk mengenai gender. Sosialisasi fungsi struktur tersebut dilakukan dengan institusionalisasi, melalui norma-norma yang disosialisasikan.



3.2 Kesenjangan dan Keadilan Gender

Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau tidak adil akibat dari sistem struktur sosial di mana baik perempuan dan laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara keseluruhan ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh kaum perempuan, namun ketidakadilan gender itu berdampak pula terhadap laki-laki. Bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan gender akibat diskriminasi gender itu mencakup keadaan sebagai berikut.

3.2.1 Marjinalisasi atau Peminggiran

Proses marjinalisasi atau pemiskinan yang merupakan proses, sikap, perilaku masyarakat maupun kebijakan negara yang berakibat pada penyisihan/ pemiskinan bagi perempuan atau laki-laki.

Contoh-contoh marjinalisasi:

- a. Banyak pekerja perempuan kurang dipromosikan menjadi kepala cabang atau kepala bagian dalam posisi birokrat. Begitu pula politisi perempuan kurang mendapat porsi dan pengakuan yang sama dibandingkan dengan politisi laki-laki.
- b. peluang untuk menjadi pimpinan di lingkungan TNI (jenderal) lebih banyak diberikan kepada laki-laki ketimbang perempuan.
- c. Sebaliknya banyak lapangan pekerjaan yang menutup pintu bagi laki-laki seperti industri garmen dan industri rokok karena anggapan bahwa mereka kurang teliti melakukan pekerjaan yang memerlukan kecermatan dan kesabaran.

3.2.2 Subordinasi



Proses sub-ordinasi adalah suatu keyakinan bahwa satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya, sehingga ada jenis kelamin yang merasa dinomorduakan atau kurang didengarkan suaranya, bahkan cenderung dieksploitasi tenaganya.

Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsir keagamaan maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan pada tatanan sub-ordinat.

Contoh-contoh sub-ordinasi

- a. Banyak pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan seperti “guru taman kanak-kanak, sekretaris, atau perawat”, yang dinilai lebih rendah dibanding dengan pekerjaan laki-laki seperti direktur, dosen diperguruan tinggi, dokter, dan tentara. Hal tersebut berpengaruh pada perbedaan gaji yang diterima oleh perempuan.
- b. Perempuan dipinggirkan dari beberapa jenis kegiatan baik dibanding pertanian dan industri serta bidang tenaga kerja yang lebih banyak dimiliki oleh laki-laki.
- c. Selain itu perkembangan teknologi telah menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang pada umumnya dikerjakan oleh tenaga laki-laki.
- d. Apabila seorang istri yang hendak mengikuti tugas belajar atau hendak bepergian ke luar negeri, harus mendapat izin dari suami. Tetapi apabila suami yang akan pergi ia bisa mengambil keputusan sendiri tanpa harus mendapat izin dari istri. Kondisi semacam itu telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting sehingga jika karena kemampuannya ia bisa menempati posisi penting sebagai pimpinan, bawahannya yang berjenis laki-laki seringkali merasa tertekan.
- e. Sebagai seorang laki-laki menjadi bawahan seorang perempuan, maka pola pikir seorang laki-laki masih memandang bos perempuan tadi sebagai makhluk lemah dan lebih rendah. Sehingga laki bawahan merasa “kurang laki-laki”. Inilah bentuk ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan namun yang dampaknya mengenai laki-laki.

3.2.3 Pandangan Stereotipe



Stereotipe adalah suatu pelabelan yang sering kali bersifat negatif secara umum terhadap salah satu jenis kelamin tertentu. Stereotipe selalu melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi yang bersumber dari pandangan gender.

Contoh-contoh Stereotipe

- a. Tugas dan fungsi serta peran perempuan hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kerumahtanggaan atau tugas domestik.
- b. Label kaum perempuan sebagai ”ibu rumah tangga” sangat merugikan mereka jika hendak aktif dalam kegiatan laki-laki seperti kegiatan politik, bisnis maupun birokrasi.
- c. Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama (*a main breadwinner*) mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sambilan saja (*a secondary breadwinner*) sehingga kurang dihargai untuk kegiatan di masyarakat bahkan ditingkat pemerintahan dan negara hanyalah merupakan ”perpanjangan” dari peran domestiknya. Misalnya karena perempuan dianggap pandai merayu maka ia dianggap lebih pas bekerja dibagian penjualan.
- d. Apabila laki-laki marah, maka dianggap tegas tetapi apabila perempuan marah atau tersinggung dianggap emosional dan tidak dapat menahan diri. Standar penilaian terhadap perempuan dan laki-laki berbeda namun standar nilai tersebut lebih banyak merugikan perempuan.

3.2.4 Kekerasan

Kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Oleh karena itu kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan, dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik seperti pelecehan seksual, ancaman dan paksaan sehingga secara emosional perempuan atau laki-laki yang mengalaminya akan merasa terusik batinnya. Pelaku kekerasan yang bersumber karena gender ini bermacam-macam. Ada yang bersifat individual seperti di dalam rumah tangga sendiri maupun di tempat umum dan juga di dalam masyarakat dan negara. Berbagai kekerasan terhadap perempuan terjadi sebagai akibat dari perbedaan peran gender yang tidak seimbang.



Contoh-contoh kekerasan (fisik maupun mental psikologis)

- a. Istri menghina / mencela kemampuan seksual atau kegagalan karier suami.
- b. Perempuan dan anak-anak dijadikan sandera dalam suatu konflik sosial /ethnis atau antar negara.
- c. Istri tidak boleh bekerja oleh suami setelah menikah.
- d. Istri tidak boleh mengikuti segala macam pelatihan dan kesempatan – kesempatan meningkatkan SDMnya.
- e. Istri tidak boleh mengikuti kegiatan sosial di luar rumah.
- f. Suami membatasi uang belanja dan memonitor pengeluarannya secara ketat.
- g. Orang tua memukul dan menghajar anaknya.

3.2.5 Beban Ganda Bagi Perempuan

Beban ganda adalah peran dan tanggung jawab seseorang dalam melakukan berbagai jenis kegiatan sehari-hari. Beban kerja ganda yang sangat memberatkan seseorang adalah suatu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya, beberapa jenis kegiatan dilakukan oleh laki-laki, dan beberapa yang lain dilakukan oleh perempuan. Beban ganda ini seringkali dipandang dari sudut budaya sebagai bentuk pengabdian dan pengorbanan yang mulia yang nanti di akherat mendapatkan balasan yang setimpal. Namun demikian harus ada suatu batas dari pengorbanan ini, karena pengorbanan yang tanpa batas berarti menjurus kepada ketidakadilan.

Contoh-contoh beban kerja

- a. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga, sehingga bagi mereka yang bekerja di luar rumah, selain bekerja di wilayah publik mereka juga masih harus mengerjakan pekerjaan domestik. Dengan demikian perempuan melakukan beban ganda yang memberatkan (*double burden*).
- b. Seorang ibu dan anak perempuannya mempunyai tugas untuk menyiapkan makanan dan menyediakannya di atas meja, kemudian merapikan kembali sampai mencuci piring-piring yang kotor.



- c. Seorang bapak dan anak laki-laki setelah selesai makan, mereka akan meninggalkan meja makan tanpa merasa berkewajiban untuk mengangkat piring kotor yang mereka pakai. Apabila yang mencuci isteri, walaupun ia bekerja mencari nafkah keluarga ia tetap menjalankan tugas pelayanan yang dianggap sebagai kewajibannya.

3.3 Pengarusutamaan Gender

Kajian tentang perempuan umumnya bukan sekedar untuk mendapatkan pemahaman tentang perempuan itu sendiri tetapi juga pemahaman tentang laki-laki dan tentu yang lebih penting adalah untuk memahami juga bagaimana suatu masyarakat terorganisasi. Bagaimanapun juga perempuan tidak mungkin terlepas dari sistem sosialnya dan tentunya terdapat banyak nilai yang melekat pada perempuan yang merupakan hasil dari konstruksi sosial di mana ada keterlibatan berbagai kekuatan di dalamnya (Abdullah, 1997).

Usaha memahami perempuan juga merupakan usaha memahami masyarakat dan usaha ini tidak akan berhasil apabila tidak menggunakan teori-teori sosial yang ada. Memang ada bahayanya karena teori sosial yang ada saat ini merupakan konstruksi dari kaum laki-laki, seperti apa yang dikemukakan oleh Simone de Beauvoir bahwa dunia itu hasil karya laki-laki dan wanita hanyalah “warga kelas dua” yang keberadaannya tidak diperhitungkan. (Abdullah, 1997)

Menghadapi hal ini maka kajian tentang perempuan harus dilakukan dari dua arah yaitu dari sisi teoretis dan dari sisi empiris, dengan kata lain suara perempuan harus didengarkan dalam usaha mempertanyakan keabsahan teori sosial yang ada saat ini (Abdullah, 1997: v)

Dalam mempelajari perempuan tidak akan terlepas dari tiga proses sosial dalam pembentukan realitas perempuan, yaitu: konstruksi, dekonstruksi dan rekonstruksi. (Berger dalam Abdullah, 1997: 5). Konstruksi merupakan susunan suatu realitas objektif yang telah diterima dan menjadi kesepakatan umum, meskipun dalam proses konstruksi itu tersirat dinamika sosial. Dekonstruksi terjadi saat keabsahan realitas (objektif) kehidupan wanita dipertanyakan yang kemudian memperlihatkan praktik-praktik baru dalam kehidupan wanita. Dekonstruksi ini kemudian menghasilkan suatu proses rekonstruksi, yang merupakan proses rekonseptualisasi dan redefinisi wanita. (Abdullah, 1997: 5)



Pada awal perkembangannya perempuan memang selalu diposisikan pada wilayah domestik dimana seorang wanita harus berada di rumah mengurus suami dan anak sehingga muncul konsep perempuan yang baik atau sempurna adalah perempuan yang dapat menjadi istri yang dengan baik dan penuh pengabdian melayani suami dan juga menjadi pendidik anak-anak mereka agar dapat menjadi anak yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Inilah yang selalu ditanamkan pada perempuan sepanjang hidupnya bahkan telah direproduksi dalam berbagai bentuk wacana yang menjadi kekuatan penting dalam membentuk perempuan tentang peran penting domestik mereka. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perayaan hari ibu yang menegaskan betapa penting dan mulianya peran seorang ibu, demikian juga peringatan hari Kartini yang awalnya merupakan perlambang perlawanan kaum perempuan, tetapi saat ini telah berubah maknanya mengkonstruksi peran perempuan.

Dengan perkembangan jaman saat ini, dimana perempuan sudah mulai merambah ke wilayah publik, tentunya ada banyak perubahan pada sistem sosial masyarakat. Seperti adanya pembagian peran dalam mengurus anak, bahkan peran perempuan sebagai ibu yang berhak untuk melahirkan dapat terabaikan dan terkadang hak-hak perempuan seperti hak cuti melahirkan atau cuti saat haid dapat terabaikan pula karena hal itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Bukan hanya itu tetapi terjadi pula pengambilalihan sektor-sektor yang awalnya dikuasai perempuan, oleh laki-laki. Hal ini terjadi ketika kesempatan kerja bagi laki-laki mulai berkurang, kemudian mereka mulai mengambil alih atau melakukan ekspansi ke sektor-sektor yang semula ditangani oleh perempuan (Abdullah, 1997: 12). Hal lain juga terjadi ketika perempuan mulai merambah ke sektor publik, tetap laki-lakilah yang diutamakan, dan jika peluang laki-laki terbatas maka mereka akan melakukan marginalisasi terhadap perempuan (Abdullah, 1997: 12) Walaupun perempuan dipekerjakan, itu karena mereka merupakan angkatan kerja dengan upah yang rendah sehingga perusahaan dapat memaksimalkan keuntungannya.

Banyak gerakan yang terutama didukung oleh ideologi feminisme telah menyadarkan perempuan untuk terjun ke dunia publik dan gerakan semacam ini telah menghasilkan pengaruh yang cukup dahsyat. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi perempuan dalam dunia publik secara kuantitatif terus meningkat serta dari jumlah bidang pekerjaan yang dapat dimasuki oleh perempuan pun makin lama makin meningkat. Namun, yang patut untuk mendapat perhatian adalah



dari sisi kualitas keterlibatan perempuan dalam pembangunan, seperti upah mereka yang masih rendah, keterlibatan mereka dalam menentukan kebijakan dan suara mereka dalam dunia publik masih belum didengar.

Melihat pada berbagai kendala yang dihadapi perempuan dalam dunia publik, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan tidak sepenuhnya diterima oleh laki-laki dan tidak mendapatkan pengesahan secara kelembagaan. Laki-laki masih menilai perempuan sebagai ibu/istri, bukan sebagai pekerja yang profesional. Hal ini terlihat dari struktur upah yang timpang dan dari jenis pekerjaan yang “diperbolehkan” untuk perempuan. Di sini laki-laki telah memproduksi ketimpangan gender dengan melihat perempuan lebih sebagai “pendatang” atau “pelengkap”, bukan sebagai mitra kerja (Abdullah, 1997: 17)

Sebenarnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan ini sudah mulai di bahas terutama dengan dikembangkannya konsep emansipasi dan ini terjadi sekitar tahun 1950-1960, seperti yang dikembangkan oleh badan dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1957, dimana untuk pertama kalinya mengeluarkan sebuah resolusi tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan yang kemudian disusul melalui ECOSOC dengan resolusi yang pertama pada 12 Juli 1963 yang secara khusus mengakui pentingnya peranan perempuan dalam pembangunan sosial, ekonomi nasional (Achmad, 1991: 98).

Namun baru pada awal tahun 1970-an, yaitu pada awal pelaksanaan Strategi Pembangunan Internasional PPB yang kedua (1971-1980) permasalahan pemerataan mulai memperhatikan perbedaan pendapatan dan kekuatan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan jaminan hukum hak-hak asasi antara laki-laki dan perempuan sudah di sadari secara internasional sejak akhir perang dunia kedua, hal ini tercermin dari berbagai pasal dalam Charter PBB tahun 1948 (Achmad, 1991: 101).

Kemudian dipertegas lagi dengan diadakannya konferensi dunia di Mexico pada tahun 1975, dimana konferensi dunia ini diselenggarakan karena disadari bahwa isu wanita dalam pembangunan tidak termasuk dalam agenda konferensi dunia wanita internasional yang diadakan sebagai kebangkitan kembali gerakan yang dimulai tahun 1960-an. Mengingat isu tentang wanita sangat penting dan perlu di angkat kepermukaan. Konferensi ini diadakan karena memperhatikan bahwa



seringkali pembangunan yang dilaksanakan berdampak merugikan wanita dan proyek-proyek pembangunan seringkali meremehkan serta tidak menganggap peran tradisional wanita dibidang sosial maupun ekonomi, sehingga hal ini makin memperlebar jurang perbedaan kesempatan yang tersedia bagi laki-laki maupun wanita. (Raharjo, 1991: 109) Adapun konfrensi ini menghasilkan deklarasi kesamaan antara perempuan & laki-laki dalam hal: (1) Pendidikan & pekerjaan; (2) Prioritas pembangunan bagi perempuan; (3) Perluas peran serta dalam pembangunan; (4) Tersedia data & informasi peran serta; (5) Pelaksanaan analisis perbedaan peran berdasarkan jenis kelamin.

Kemudian pemikiran tentang pengarusutamaan gender ini berkembang dalam *World Conference UN Mid Decade of Women*, Kopenhagen pada tahun 1980 yang menghasilkan *UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* – konvensi penghapusan seluruh bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang kemudian Indonesia meratifikasinya dalam bentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang CEDAW. Kemudian dilanjutkan dengan adanya Konferensi Perempuan keempat, Beijing, 1995 menyepakati 12 isu kritis yang sesegera harus ditangani. Indonesia telah menandatangani *Beijing Platform for Action* mengenai agenda kesepakatan internasional untuk memberdayakan perempuan.

Pemikiran mengenai pengarusutamaan gender di Indonesia sendiri telah berkembang sejak Kongres Perempuan Indonesia, Yogyakarta, 22 Desember 1928 yang kemudian diperingati sebagai Hari Ibu. Sebenarnya isu kesetaraan gender sudah mulai mengemuka dengan adanya Kementerian Perempuan pada tahun 1978 di kabinet Pembangunan II. Kemudian pemikiran pengarusutamaan gender ini berlanjut pada Deklarasi Komitmen Bersama Negara & Masyarakat untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang diadakan di Jakarta pada tanggal 24 Nopember 1999. Pada tahun 1999 dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999, “kesetaraan dan keadilan gender” telah dituangkan dalam GBHN 1999. Pada tahun 2004, dalam Rencana Kerja Pemerintah program-program yang mengandung pengarusutamaan gender telah lebih mendapat perhatian yang cukup besar yang terlihat dari berbagai program pembangunan di 9 (sembilan) sektor pembangunan yang sudah memuat berbagai kegiatan untuk meningkatkan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) (Sadiawati, 2004: 2)

Umumnya penyebab dari timbulnya permasalahan-permasalahan pembangunan yang merugikan wanita antara lain karena adanya kekeliruan dalam perencanaan pembangunan, seperti



(1) gagal memperhatikan peran produktif wanita yang secara tradisi telah dimainkan; (2) mengukuhkan nilai-nilai dari suatu masyarakat dimana aktivitas wanita dibatasi sekitar tugas-tugas rutin rumah tangga dan di sekitar mengurus anak; (3) merembesnya nilai-nilai barat mengenai pekerjaan apa yang paling cocok untuk perempuan modern di masyarakat yang sedang berkembang (Raharjo, 1991: 110-111)

Konfrensi yang diadakan di Mexico yang bertemakan “*Equality, Development and Peace*” akhirnya menghasilkan dua kubu dalam memandang masalah wanita. Kubu dari negara-negara maju cenderung untuk menekankan persamaan dalam hal perjuangan, sedangkan kubu negara-negara sedang berkembang permasalahan persamaan itu masih merupakan permasalahan yang dianggap “mewah”, mereka lebih menuntut pada penghapusan kemiskinan sebagai fokus perjuangan mereka. Dalam hal ini wanita harus merupakan bagian dari pembangunan atau dengan kata lain terintegrasinya wanita dalam pembangunan. Sehingga yang dimaksud dengan wanita dalam pembangunan adalah terintegrasinya wanita dalam proses pembangunan, wanita harus menjadi subjek sekaligus penikmat dari pembangunan dan bukan lagi sebagai atribut yang pasif, karena dalam istilah teritegrasi wanita dituntut untuk berperan sebagai aktor yang aktif dan kreatif (Raharjo, 1991: 113).

Regulasi yang pertama dikeluarkan oleh Pemerintah terkait dengan upaya untuk meningkatkan pengarusutamaan gender di Indonesia adalah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender yang menginstruksikan kepada seluruh kantor kementerian, lembaga pemerintah non departemen, pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi /tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Gubernur serta Bupati/Walikota untuk melaksanakan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Pelaksanaan dari Instruksi Presiden tersebut kemudian ditindaklanjuti antara lain dengan terbentuknya fokal poin atau kelompok kerja sesuai dengan bidang-bidang/sektor masing-masing, yaitu 9 sekto/bidang pembangunan yang dijabarkan dalam 36 program. Sektor yang dimaksud adalah sektor pertanian, sosial budaya, hukum, pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, kesehatan, keluarga berencana dan lingkungan



hidup. Di dalam pelaksanaan program-program dari 9 (sembilan) sektor pembangunan tersebut, khususnya bidang pembangunan hukum yang dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta), fokus poin bekerjasama dengan kelompok kerja bidang pembangunan hukum setiap tahunnya selalu melakukan rapat koordinasi dalam rangka mensinergikan pengarusutamaan gender dalam setiap program yang akan dilaksanakan. Pada akhir pelaksanaan program setiap tahunnya dapat dilihat hasilnya melalui evaluasi dan monitoring dari pelaksanaan program (Sadiawati, 2004: 2-3).

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Sosial ini kemudian dilengkapi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, yang merupakan peraturan pembaharuan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003. Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dimuat Tahapan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan, Termasuk di dalamnya diatur tentang Focal Point, dan tentunya Tahapan yang tidak kalah pentingnya adalah Tahapan Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi. Termasuk di dalamnya tentang Pembinaan dan Pendanaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

3.3.1 Analisis Gender

Analisis gender adalah proses penganalisisan data dan informasi secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab dalam proses pembangunan, serta faktor-faktor yang memengaruhi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM). Analisis Gender dapat juga diartikan sebagai suatu analisis yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, perencana untuk menilai kelayakan dan dampak kebijakan yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki atas program dan/atau peraturan yang diusulkan dan dilaksanakan. Analisis gender mengakui bahwa realitas kehidupan perempuan serta laki-laki adalah berbeda, sedangkan kesempatan yang sama tidak harus berarti menghasilkan hasil yang sama. Analisis gender timbul dari keperluan untuk menjadikan pengalaman, perhatian, sebagai perempuan dan sebagai laki-laki ke dalam arusutama. Analisis gender mengidentifikasi isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Karena perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan



adanya perbedaan di antara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta memperoleh manfaat yang adil dari hasil pembangunan.

Analisis gender berfokus pada memahami perbedaan-perbedaan gender dalam peran, aktivitas, kebutuhan dan kesempatan pada konteks tertentu. Analisis gender menyoroti perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Hal ini beragam sifatnya menurut waktu, budaya, kelas sosial, etnik dan faktor-faktor lainnya. Itu sebabnya analisis gender tidak memperlakukan perempuan dan laki-laki sebagai kelompok yang homogen, tetapi memperlakukan sifat-sifat atas dasar gender sebagai sesuatu yang dapat diubah dan memerlukan data terpisah menurut jenis kelamin.

Analisis gender yang diaplikasikan untuk intervensi pembangunan dapat mendorong: (1). Mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender atau faktor penyebab terjadinya kesenjangan; (2). Mengidentifikasi isu-isu gender, yaitu isu yang muncul karena adanya perbedaan-perbedaan atas dasar gender yang mungkin terjadi di antara anggota keluarga dan/atau di dalam masyarakat dalam memperoleh akses, kontrol, partisipasi dan manfaat dalam pembangunan; (3). Memungkinkan para perencana melakukan perencanaan yang efektif, efisien, berkeadilan dan memberdayakan melalui rancangan kebijakan dan strategi yang tepat dan sensitif terhadap isu-isu gender.

Untuk dapat melakukan analisis gender, perlu dipahami faktor-faktor yang memengaruhi analisis gender, antara lain sebagai berikut.

1. **Akses:** Faktor ini diperlukan untuk mengukur seberapa besar peluang atau kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk memanfaatkan sumber daya (baik sumber daya alam, sosial, politik maupun waktu).
2. **Partisipasi:** Partisipasi adalah pelibatan atau keterwakilan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam program, kegiatan, dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan. Faktor ini berguna untuk melihat proporsi dari laki-laki atau perempuan yang termarginalisasi baik secara kelas, suku, ras maupun budaya.



3. **Kontrol:** Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap penggunaan sumber daya tersebut. Faktor ini diperlukan untuk melihat proporsi perempuan atau laki-laki dalam pengambilan keputusan.
4. **Manfaat:** Manfaat adalah hasil-hasil dari suatu proses pembangunan. Faktor ini digunakan untuk melihat proporsi manfaat pembangunan yang diterima oleh perempuan atau laki-laki. Apakah manfaat tersebut cenderung menguntungkan salah satu jenis kelamin.

Setidaknya ada dua model analisis gender yang biasa dipakai menganalisis data gender hingga didapatkan masalah-masalah gender.

1) *Model Gender Analysis Pathway (GAP)*

Gender Analysis Pathway (GAP) adalah metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender ke dalam kebijakan / program / kegiatan hingga dalam proses menyusun rencana aksi. Model GAP merupakan salah satu alat analisis gender yang dapat membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender ke dalam proses perencanaan kebijakan/program dan kegiatan pembangunan.

Model atau metode GAP adalah metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, peran, control dan manfaat yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam menerima manfaat pembangunan. Selain itu dengan model GAP dapat diketahui kesenjangan gender dan permasalahan gender. Dengan mengetahui kesenjangan gender tersebut para perencana atau pembuat kebijakan dapat menyusun rencana melalui penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender. Langkah-langkah analisa Model GAP ini adalah sebagai berikut:

Langkah 1: Tentukan Tujuan Kebijakan

Mengidentifikasi dan menuliskan tujuan dari kebijakan, program dan kegiatan, memilih apa yang kita analisis, apakah kebijakan, jika kebijakan yang menjadi fokus analisis maka yang menjadi acuan kita adalah tujuan dari kebijakan tersebut, demikian juga jika kita memilih program atau kegiatan yang dianalisis.



Langkah 2: Menyajikan Data terpilah

Menyajikan data pembuka wawasan, data yang dimaksud adalah data terpilah menurut jenis kelamin untuk melihat apakah ada kesenjangan gender. Data pembuka wawasan bisa berupa data statistik yang kuantitatif atau yang kualitatif, misalnya hasil survei, hasil FGD atau review pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan atau hasil intervensi kebijakan / program / kegiatan yang sedang dilakukan atau sudah dilakukan.

Langkah 3: Mengenali Isu Kesenjangan Gender

Menemukan isu gender di dalam proses perencanaan kebijakan / program / kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan dengan cara memperhatikan 4 faktor indikator gender yaitu (1). Akses (2). Kontrol (3). Partisipasi dan (4). Manfaat.

Langkah 4: Menemukan Isu Gender di Internal Lembaga

Menemukan isu gender di internal lembaga atau budaya organisasi yang menyebabkan terjadinya isu gender, misalnya terkait dengan produk hukum, kebijakan, pemahaman gender yang masih terbatas / kurang diantara pemegang keputusan, perencana dan juga political will dari pembuat kebijakan.

Langkah 5: Menemukan Isu Gender di Eksternal Lembaga

Menemukan isu gender di eksternal lembaga pada proses perencanaan, misalnya apakah perencana program sensitif gender terhadap kondisi isu gender di dalam masyarakat yang menjadi target program, kondisi masyarakat sasaran yang belum kondusif, misalnya, budaya patriarki dan stereotipe.

Langkah 6: Merumuskan Kebijakan

Merumuskan kembali tujuan kebijakan / program / kegiatan sesuai dengan hasil identifikasi dan analisis tujuan.

Langkah 7: Menyusun Rencana Aksi



Menyusun rencana aksi yang responsif gender dengan merujuk pada isu gender yang telah teridentifikasi (langkah 3-5) dan sesuai dengan tujuan program / kegiatan yang telah direformulasi sesuai langkah 6.

Langkah 8: Pengukuran Hasil

Menetapkan data dasar untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijakan / program / kegiatan. Data dasar dimaksud dapat diambil dari data pembuka wawasan seperti yang telah diungkapkan pada langkah 2.

Langkah 9: Indikator Gender

Menetapkan indikator gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk memperhatikan apakah kesenjangan gender sudah tidak ada atau berkurang (BAPPENAS, 2002).

2) Model *Problem Based Approach* (PROBA)

PROBA yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dengan dukungan UNFPA. Model ini hampir sama dengan Model GAP. Perbedaannya, Model ini hanya dirancang menjadi 7 (tujuh) langkah sebab dalam Model ini Langkah 1-3 Model GAP menjadi langkah pertama. Adapun langkah-langkah analisis gender model PROBA adalah sebagai berikut.

Analisis masalah gender merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan/merumuskan masalah gender yang terjadi di tiap instansi atau wilayah. Beberapa tahap analisis masalah gender adalah sebagai berikut.

Langkah 1. Identifikasi data terpilah

Identifikasi data di sertai dengan kesenjangan gender yang terjadi di wilayah masing-masing dalam bentuk data yang kualitatif maupun kuantitatif.

Langkah 2. Penetapan masalah kesenjangan gender



Dari data terpilah yang menunjukkan kesenjangan gender tersebut ditetapkan masalah gender dalam bentuk kalimat yang jelas.

Langkah 3. Identifikasi faktor penyebab

Kesenjangan gender diformulasikan dan dianalisis apa yang menjadi faktor penyebab dari kesenjangan, misalnya; faktor sosial/lingkungan, faktor agama, faktor adat istiadat/budaya, faktor ekonomi, faktor peraturan perundang-undangan, faktor kebijakan dan lainnya.

Langkah 4. Telaah Kebijakan

Telaah dari kebijakan, program dan kegiatan merupakan kegiatan untuk menelaah kembali keputusan atau kebijakan/program/kegiatan yang telah di sepakati. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan pada telaah kebijakan yaitu;

1. **Analisis kebijakan:** Menulis kembali kebijakan/program/ kegiatan yang tertulis dalam Rencana pembangunan Jangka Panjang untuk Pusat dan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah.
2. **Klasifikasi kebijakan:** Klasifikasikan kebijakan/program/ kegiatan dalam klasifikasi netral (bias) atau responsif gender.
3. **Penetapan kebijakan/program/kegiatan yang strategis**

Dari berbagai kebijakan/ program/ kegiatan yang ada harus dipilih kebijakan/ program / kegiatan yang strategis yang di harapkan mampu untuk mengatasi masalah pembangunan.

Langkah 5. Formulasi Kebijakan Baru

Dari kebijakan/program/kegiatan strategis yang ternyata bias dan netral gender direformulasikan kebijakan/program/kegiatan baru yang responsif gender. Dari kebijakan baru yang responsif gender, selanjutnya dituliskan tujuan baru yang responsif gender. Bandingkan dengan tujuan yang lama.



Langkah 6. Penyusunan Rencana Aksi

Setelah program pokok ditetapkan, selanjutnya ditentukan rencana aksi dan kegiatan intervensi yang perlu dilakukan. Di dalam uraian kegiatan intervensi, tetapkan pula target/sasaran pelaksanaan dan waktu pelaksanaan.

Langkah 7. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan langkah-langkah analisis dan mengadakan perbaikan apabila diperlukan. Laporan monitoring evaluasi menjadi bahan masukan untuk analisis kebijakan yang diperlukan berikutnya.



BAB IV GENDER DALAM BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan adalah salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator keberhasilan pembangunan bersama - sama dengan komponen kesehatan dan ekonomi. Pendidikan merupakan strategi membentuk sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja pendidikan yang dipakai ukuran sebagai komponen pembentuk IPM adalah lamanya penduduk usia 25 tahun ke atas menempuh pendidikan selama hidupnya. Selain sebagai komponen pembentuk IPM, pendidikan juga merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks pemberdayaan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang merupakan indikator keberhasilan pemberdayaan gender dan pembangunan gender. Oleh karena itu kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan haruslah sensitif gender, dalam artian memberikan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses pendidikan, kesempatan partisipasi dalam pendidikan, kontrol atas sumber daya pendidikan, dan menerima manfaat dari pendidikan.

Dalam rangka mengenali apakah kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan sudah sensitif gender atau tidak diperlukan data terpilah terkait dengan kinerja penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut.

4.1 Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM dipakai sebagai salah satu indikator pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada berbagai jenjang Pendidikan.

4.1.1 Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar

Angka partisipasi murni Sekolah Dasar adalah proporsi siswa Sekolah Dasar yang berusia 7-12 tahun terhadap penduduk kelompok umur 7-12 tahun. Angka partisipasi murni Sekolah Dasar Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 4.1



Tabel 4.1
Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar Kabupaten Buleleng Tahun 2021-2022

Kecamatan	APM SD	
	2021	2022
1	2	3
Gerokgak	92,40	92,13
Seririt	100,42	87,14
Busungbiu	100,31	87,01
Banjar	100,68	97,77
Sukasada	102,21	107,61
Buleleng	99,99	106,94
Sawan	108,41	96,11
Kubutambahan	94,34	110,09
Tejakula	94,93	101,17
Kab. Buleleng	98,98	99,13

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng

Dari data tabel 4.1, pada tahun 2022 APM SD lebih tinggi dibanding tahun 2021. Pada tahun 2021 dan 2022 tidak tersedia data terpilah APM SD. Ini berarti stakeholder terkait tidak memilah data APM SD.

4.1.2 Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama

Angka partisipasi murni SMP adalah proporsi siswa SMP berusia 13-15 tahun terhadap penduduk kelompok umur 13-15 tahun. Angka partisipasi murni SMP Kabupaten Buleleng tahun 2021-2022 disajikan pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama
Kabupaten Buleleng Tahun 2021-2022

Kecamatan	APM SMP	
	2021	2022
1	2	3
Gerokgak	91,83	79,99
Seririt	77,81	72,27
Busungbiu	71,51	63,14
Banjar	88,14	74,15
Sukasada	88,06	68,83
Buleleng	94,98	91,81
Sawan	87,65	77,14
Kubutambahan	83,28	75,65



Kecamatan	APM SMP	
	2021	2022
1	2	3
Tejakula	85,21	84,57
Kab. Buleleng	87,20	77,99

Sumber; Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng

Dari data tabel 4.2, Angka partisipasi murni SMP menurun tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, dan tahun 2021-2022 tidak tersedia data terpilah Angka partisipasi murni SMP. Ini berarti stakeholder terkait tidak memilah data Angka partisipasi murni SMP.

4.1.3 Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Atas

Angka partisipasi murni SMA adalah proporsi siswa SMA berusia 15-17 tahun terhadap penduduk kelompok umur 15-17 tahun. Angka partisipasi murni SMA Kabupaten Buleleng tahun 2021-2022 tidak dapat disajikan karena tidak tersedia data Angka partisipasi murni SMA di Kabupaten Buleleng. Hal ini disebabkan pengelolaan SMA bukan lagi urusan Pemerintah Kabupaten, melainkan urusan Pemerintah provinsi. Profil dan Informasi Pendidikan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali tidak memuat APM SMA per kabupaten. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten perlu meminta informasi berkaitan dengan Pendidikan SMA kepada Pemerintah Provinsi. Bagaimanapun juga warga belajar SMA di Kabupaten Buleleng adalah penduduk Buleleng yang perlu diketahui kondisinya oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng

4.1.4 Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Kejuruan

Tahun 2021-2022 tidak tersedia data Angka partisipasi murni SMK di Kabupaten Buleleng. Hal ini disebabkan pengelolaan SMK bukan lagi urusan Pemerintah Kabupaten, melainkan urusan Pemerintah Provinsi. Profil dan Informasi Pendidikan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali tidak memuat Angka partisipasi murni SMK per kabupaten. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten perlu meminta informasi berkaitan dengan Pendidikan SMK kepada Pemerintah Provinsi. Bagaimanapun juga warga belajar SMK di Kabupaten Buleleng adalah penduduk Buleleng yang perlu diketahui kondisinya oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng



4.2 Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

4.2.1 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar

Angka partisipasi kasar Sekolah Dasar adalah rasio jumlah siswa Sekolah Dasar terhadap penduduk kelompok usia 7-12 tahun. APK Sekolah dasar Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 4.3

Tabel 4.3
Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar
Kabupaten Buleleng Tahun 2021-2022

Kecamatan	APK SD	
	2021	2022
1	2	3
Gerokgak	98,04	99,50
Seririt	106,74	94,11
Busungbiu	94,43	93,97
Banjar	109,08	105,59
Sukasada	110,01	116,25
Buleleng	99,22	119,36
Sawan	127,18	106,90
Kubutambahan	93,22	119,13
Tejakula	136,11	109,27
Kab. Buleleng	105,87	108,12

Sumber: Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng

Dari data tabel 4.3, pada tahun 2022 lebih tinggi Angka partisipasi kasar SD dibanding tahun 2021. Tahun 2021 dan 2022 tidak tersedia data terpilah APK SD. Ini berarti stakeholder terkait tidak memilah data APK SD.

4.2.2 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama

Angka Partisipasi Kasar SMP adalah rasio jumlah siswa SMP terhadap penduduk kelompok usia 13-15 tahun. Angka partisipasi kasar SMP Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 4.4.



Tabel 4.4
Angka partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama
Kabupaten Buleleng tahun 2021-2022

Kecamatan	APK SMP	
	2021	2022
1	2	3
Gerokgak	149,16	97,08
Seririt	90,62	84,67
Busungbiu	77,47	86,24
Banjar	121,00	95,27
Sukasada	145,35	93,33
Buleleng	87,94	119,35
Sawan	90,91	90,97
Kubutambahan	95,80	98,60
Tejakula	78,90	97,44
Kab. Buleleng	102,73	97,08

Sumber: Dinas Pendidikan pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng

Dari data tabel 4.4, Angka partisipasi kasar SMP menurun tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, dan tahun 2021-2022 tidak tersedia data terpilah APM SMP. Ini berarti stakeholder terkait tidak memilah data APM SMP.

4.2.3 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas

Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas adalah rasio jumlah siswa SMA terhadap penduduk kelompok usia 15-17 tahun. APK SMA Kabupaten Buleleng tidak dapat disajikan Tahun 2021 dan 2022 karena tidak tersedia data APK SMA di Kabupaten Buleleng. Hal ini disebabkan pengelolaan SMA bukan lagi urusan Pemerintah Kabupaten, melainkan urusan Pemerintah Provinsi. Profil dan Informasi Pendidikan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali tidak memuat APK SMA per kabupaten. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten perlu meminta informasi berkaitan dengan Pendidikan SMA kepada Pemerintah Provinsi. Bagaimanapun juga warga belajar SMA di Kabupaten Buleleng adalah penduduk Buleleng yang perlu diketahui kondisinya oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, walaupun urusan Pendidikan SMA merupakan urusan Pemerintah Provinsi.

4.2.4 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Kejuruan

Angka Partisipasi Kasar SMK Tahun 2021 dan 2022 tidak tersedia di Kabupaten Buleleng. Hal ini disebabkan pengelolaan SMK bukan lagi urusan Pemerintah Kabupaten, melainkan urusan



Pemerintah Provinsi. Profil dan Informasi Pendidikan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali tidak memuat APK SMK per kabupaten. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten perlu meminta informasi berkaitan dengan Pendidikan SMK kepada Pemerintah Provinsi. Bagaimanapun juga warga belajar SMK di Kabupaten Buleleng adalah penduduk Buleleng yang perlu diketahui kondisinya oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, walaupun urusan Pendidikan SMK merupakan urusan Pemerintah Provinsi.

4.3 Jumlah Siswa

4.3.1 Jumlah Siswa Sekolah Dasar / MI

Jumlah siswa Sekolah Dasar dan MI di Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Jumlah Siswa Sekolah Dasar / MI Kabupaten Buleleng Tahun 2021-2022

Kecamatan	2021			2022		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	8	9	10
Gerokgak	4859	4574	9433	3935	3713	7648
Seririt	3582	3416	6998	3585	3452	7037
Busungbiu	1969	1902	3871	2005	1949	3954
Banjar	3576	3245	6821	3723	3463	7186
Sukasada	4249	3899	8148	4285	3946	8231
Buleleng	7448	6813	14.261	7018	6493	13.511
Sawan	3351	3094	6445	3487	3199	6686
Kubutambahan	3139	3030	6169	3309	3176	6485
Tejakula	3056	2864	5920	3308	3093	6401
Kab. Buleleng	35.230	32.836	68.066	34.656	32.483	67.139

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Tabel 4.5 menunjukkan ada kesenjangan gender pada siswa Sekolah Dasar Kabupaten Buleleng tahun 2021 dan tahun 2022. Jumlah siswa laki-laki lebih besar dari jumlah siswa perempuan. Dominasi siswa laki-laki di Sekolah Dasar terjadi di semua kecamatan di Kabupaten Buleleng.

4.3.2 Jumlah Siswa SMP

Jumlah siswa Sekolah Menengah Pertama disajikan pada tabel 4.6



Tabel 4.6
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama
Kabupaten Buleleng Tahun 2021-2022

Kecamatan	2021			2022		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	8	9	10
Gerokgak	1897	1758	3655	1953	1172	3725
Seririt	1661	1562	3223	1711	1584	3295
Busungbiu	1133	1032	2165	1126	1045	2171
Banjar	1992	1902	3894	2005	1867	3872
Sukasada	1527	1424	2951	1559	1417	2976
Buleleng	4378	3952	8330	4411	3941	8352
Sawan	1583	1543	3126	1651	1577	3228
Kubutambahan	1544	1537	3081	1617	1599	3216
Tejakula	1570	1420	2990	1559	1460	3019
Jumlah	17.285	16.130	33.415	17.592	16.262	33.854

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Tabel 4.6 menampilkan kesenjangan gender, walau tidak menonjol, pada siswa SMP di Kabupaten Buleleng tahun 2021 dan 2022. Siswa Laki-laki jumlahnya lebih banyak ketimbang siswa perempuan. Jika dilihat per kecamatan kesenjangan gender, walau tidak menonjol, terjadi di semua kecamatan.

4.3.3 Jumlah Siswa SMA

Tahun 2021 dan 2022 tidak tersedia data jumlah siswa SMA di Kabupaten Buleleng. Hal ini disebabkan pengelolaan SMA bukan lagi urusan Pemerintah Kabupaten, melainkan urusan Pemerintah Provinsi. Profil dan Informasi Pendidikan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali tidak memuat jumlah siswa SMA per kabupaten. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten perlu meminta informasi berkaitan dengan Pendidikan SMA kepada Pemerintah Provinsi. Bagaimanapun juga warga belajar SMA di Kabupaten Buleleng adalah penduduk Buleleng yang perlu diketahui kondisinya oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, walaupun urusan Pendidikan SMA merupakan urusan Pemerintah Provinsi.

4.3.4 Jumlah Siswa SMK

Tahun 2021 dan 2022 tidak tersedia data jumlah siswa SMK di Kabupaten Buleleng. Hal ini disebabkan pengelolaan SMK bukan lagi urusan Pemerintah Kabupaten, melainkan urusan Pemerintah Provinsi. Profil dan Informasi Pendidikan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan



Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali tidak memuat jumlah siswa SMK per kabupaten. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten perlu meminta informasi berkaitan dengan Pendidikan SMK kepada Pemerintah Provinsi. Bagaimanapun juga warga belajar SMK di Kabupaten Buleleng adalah penduduk Buleleng yang perlu diketahui kondisinya oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, walaupun urusan Pendidikan SMK merupakan urusan Pemerintah Provinsi

4.4 Siswa Putus Sekolah

4.4.1 Siswa Putus Sekolah Sekolah Dasar

Siswa putus sekolah Sekolah Dasar di Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 4.7.

Tabel 4.7
Siswa Putus Sekolah Sekolah Dasar
Kabupaten Buleleng Tahun 2021-2022

Kecamatan	2016			2018		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Gerokgak	0	0	0	0	0	0
Seririt	0	0	0	0	0	0
Busungbiu	0	0	0	0	0	0
Banjar	0	0	0	0	0	0
Sukasada	0	0	0	0	0	0
Buleleng	0	0	0	0	0	0
Sawan	0	0	0	0	0	0
Kubutambahan	0	0	0	0	0	0
Tejakula	0	0	0	0	0	0
Kab. Buleleng	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng

Tabel 4.7 menampilkan pada tahun 2021 dan 2022 tidak ada siswa SD putus sekolah di Kabupaten Buleleng baik siswa laki maupun perempuan. Itu mengindikasikan wajib belajar 100 % sudah terlaksana.

4.4.2 Siswa Putus Sekolah SMP

Siswa putus sekolah Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 4.8



Tabel 4.8
Siswa Putus Sekolah SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2021-2022

Kecamatan	2021			2022		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	8	9	10
Gerokgak	0	0	0	0	0	0
Seririt	0	0	0	0	0	0
Busungbiu	0	0	0	0	0	0
Banjar	0	0	0	0	0	0
Sukasada	0	0	0	0	0	0
Buleleng	0	0	0	0	0	0
Sawan	0	0	0	0	0	0
Kubutambahan	0	0	0	0	0	0
Tejakula	0	0	0	0	0	0
Kab. Buleleng	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan pemuda dan Olah raga Kabupaten Buleleng

Tabel 4.8 menampilkan pada tahun 2021 dan 2022 tidak ada siswa SMP putus sekolah di Kabupaten Buleleng baik siswa laki maupun perempuan. Itu mengindikasikan wajib belajar 100% sudah terlaksana.

4.4.3 Siswa Putus Sekolah SMA

Tahun 2021 dan 2022 tidak tersedia data jumlah siswa putus sekolah SMA di Kabupaten Buleleng. Hal ini disebabkan pengelolaan SMA bukan lagi urusan Pemerintah Kabupaten, melainkan urusan Pemerintah Provinsi. Profil dan Informasi Pendidikan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali tidak memuat jumlah siswa SMA per kabupaten. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten perlu meminta informasi berkaitan dengan Pendidikan SMA kepada Pemerintah Provinsi. Bagaimanapun juga warga belajar SMA di Kabupaten Buleleng adalah penduduk Buleleng yang perlu diketahui kondisinya oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, walaupun urusan Pendidikan SMA merupakan urusan Pemerintah Provinsi

4.4.4 Siswa Putus Sekolah SMK

Tahun 2021 dan 2022 tidak tersedia data jumlah siswa putus sekolah SMK di Kabupaten Buleleng. Hal ini disebabkan pengelolaan SMK bukan lagi urusan Pemerintah Kabupaten, melainkan urusan Pemerintah Provinsi. Profil dan Informasi Pendidikan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali tidak memuat jumlah siswa SMK per



kabupaten. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten perlu meminta informasi berkaitan dengan Pendidikan SMK kepada Pemerintah Provinsi. Bagaimanapun juga warga belajar SMK di Kabupaten Buleleng adalah penduduk Buleleng yang perlu diketahui kondisinya oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, walaupun urusan Pendidikan SMK merupakan urusan Pemerintah Provinsi

4.5 Jumlah Guru

4.5.1 Jumlah Guru Sekolah Dasar

Jumlah guru Sekolah Dasar di Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 4.9.

Tabel 4.9
Jumlah Guru Sekolah Dasar Kabupaten Buleleng Tahun 2022

Kecamatan	2022		
	L	P	Jumlah
1	5	6	7
Gerokgak	137	204	341
Seririt	167	221	388
Busungbiu	148	164	312
Banjar	187	242	429
Sukasada	209	291	500
Buleleng	231	559	790
Sawan	146	234	380
Kubutambahan	170	194	364
Tejakula	144	164	308
Kab. Buleleng	1539	2273	3812

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng

Tahun 2022 data jumlah guru SD di Kabupaten Buleleng didominasi oleh guru Perempuan, hal ini cocok dengan stereotip bahwa kalau menjadi guru cocok menjadi guru SD.

4.5.2 Jumlah Guru SMP

Tahun 2022 jumlah guru SMP di Kabupaten Buleleng, 1890 orang didominasi oleh guru Perempuan 1065 orang dan laki-laki 825 orang, hal ini tidak berbeda jauh dengan guru SD.

4.5.3 Jumlah Guru SMA



Tahun 2022 jumlah guru SMA di Kabupaten 973 orang, guru laki-laki 482 orang dan guru Perempuan 491 orang. Jumlah guru Perempuan masih mendominasi jumlah guru laki-laki, meskipun tidak lagi signifikan, yang diambil dari data dapo.kemdikbud.go.id semester genap tahun 2022/2023.

4.5.4 Jumlah Guru SMK

Jumlah guru Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Buleleng dari Sumber dapo.kemdikbud.go.id semester genap 2022/2023, Tahun 2022 jumlah guru SMK di Kabupaten Buleleng 990 orang dengan jumlah guru laki-laki 452 orang dan guru Perempuan 538 orang. Jumlah guru Perempuan masih mendominasi guru laki-laki.

4.6 Guru Bersertifikat Pendidik

Guru bersertifikat pendidik di Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 4.10.

Tabel 4.10
Guru Sekolah Dasar Kabupaten Buleleng Bersertifikat Pendidik Tahun 2021-2022

Guru Pada Tingkat Pendidikan	2021			2022		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Guru SD (ASN)	980	681	1661	1024	985	2009
Guru SD (Non-ASN)	38	87	125	40	93	133
Guru SMP (ASN)	452	416	868	452	416	868
Guru SMP (Non-ASN)	31	24	55	61	60	121
Guru SMA						
Guru SMK						
Kab. Buleleng	1501	1208	2709	1577	1554	3131

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng

Tabel 4.10 menampilkan tahun 2021 dan 2022 ada ketimpangan gender pada guru ASN bersertifikat pendidik pada semua tingkat pendidikan dengan dominasi guru laki-laki. Namun tahun 2021 dan 2022 kesenjangan gender pada guru Non ASN bersertifikat pendidik pada tingkat pendidikan SD justru dominasi guru perempuan. Tahun 2021 dan 2022 guru SMP Non ASN sudah mulai ada kesetaraan gender, meskipun guru laki lebih banyak lagi sedikit dari guru perempuan. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SMA dan SMK di Kabupaten Buleleng tidak tersedia data guru bersertifikat pendidik. Hal ini terkait dengan pengelolaan SMA dan SMK ada di Pemerintah



Provinsi. Profil dan Informasi Pendidikan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali tidak memuat data guru bersertifikat pendidik perkabupaten.

Dari data gender terpilah di bidang pendidikan yang disajikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Ada kesenjangan gender pada jumlah siswa, APM, dan APK pada semua tingkat pendidikan di Kabupaten Buleleng dengan dominasi laki-laki.
2. Dilihat dari jumlah guru, pada tingkat pendidikan SD didominasi oleh guru perempuan, pada tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung didominasi oleh guru laki-laki.
3. Guru bersertifikat pendidik ASN didominasi oleh guru laki-laki.
4. Data gender terpilah menurut jenis kelamin tidak lengkap ketersediaannya.

Kondisi itu memerlukan pemberdayaan perempuan melalui Pengarusutamaan Gender. Upaya Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Buleleng tidak cukup dibebankan kepada Organisasi Pemerintah Daerah yang menangani pemberdayaan perempuan saja. Tetapi memerlukan dukungan regulasi di tingkat daerah dan dukungan otoritas yang lebih tinggi, serta partisipasi masyarakat.



BAB V GENDER PADA BIDANG KESEHATAN

Kinerja penyelenggaraan kesehatan merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan ukuran keberhasilan pembangunan bersama-sama dengan pendidikan dan kegiatan ekonomi. Kinerja penyelenggaraan kesehatan yang dipakai ukuran dalam pembentukan IPM adalah usia harapan hidup. Selain sebagai salah satu komponen pembentuk IPM, kinerja penyelenggaraan kesehatan juga sebagai salah satu komponen pembentuk Indeks pemberdayaan gender dan Indeks Pembangunan Gender. Oleh karena itu kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan haruslah sensitif gender dalam artian perempuan dan laki-laki memperoleh kesetaraan dan keadilan dalam akses, partisipasi, control, dan manfaat dari kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan.

Untuk mengetahui apakah kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan sudah sensitif gender atau tidak, maka diperlukan data terpilah terkait dengan kinerja penyelenggaraan kesehatan sebagai berikut.

5.1 Gender Pada Pemberian ASI Bayi

Jumlah bayi yang mendapat ASI eksklusif di Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Jumlah Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Bayi Usia 0-6 Bulan			Jumlah Bayi Asi Eksklusif Usia 0-6 Bulan		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Gerokgak			521			468 (89,8%)
Seririt			498			436 (87,6%)
Busungbiu			130			108 (83,1%)
Banjar			98			41 (41,8%)
Sukasada			562			433 (57,6%)
Buleleng			1071			936 77,0%)
Sawan			543			384 (70,7%)
Kubutambahan			538			440 (81,8%)
Tejakula			486			374 (76,9%)
Kab. Buleleng			4447			3620 (81,4%)

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng



Tabel 5.1 menampilkan jumlah bayi yang mendapatkan ASI eksklusif di Kabupaten Buleleng 3620 bayi (81,4%). Namun, bayi yang mendapatkan ASI eksklusif tidak dibedakan antara bayi laki dan perempuan.

5.2 Gender Pada Pelayanan Kesehatan Bayi

Cakupan pelayanan kesehatan Bayi di Kabupaten Buleleng tahun 2022 disajikan pada tabel 5.2.

Tabel 5.2
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Kabupaten Buleleng Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Balita			Pelayanan Kesehatan			Persentase %		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gerokgak	648	615	1263	709	670	1379	113	110	112
Seririt	545	540	1085	503	498	1001	95	92	94
Busungbiu	308	299	607	244	218	462	75	69	72
Banjar	551	535	1086	540	480	1020	96	86	91
Sukasada	592	572	1164	714	719	1433	126	129	127
Buleleng	1045	1010	2055	962	955	1917	98	102	100
Sawan	455	446	901	523	549	1072	115	121	118
Kubutambahan	428	400	828	454	442	896	107	111	109
Tejakula	414	386	800	414	388	802	104	103	104
Kab. Buleleng	4985	4803	9788	5063	4919	9982	102	102	102

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng

Dari data tabel 5.2, pada tahun 2022 menampilkan cakupan pelayanan bayi, dimana bayi laki-laki lebih banyak dilayani dibandingkan dengan perempuan. Namun secara persentase bayi yang dilayani sama.

Tabel 5.3
Jumlah Balita Ditimbang Kabupaten Buleleng Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Balita			Jumlah Ditimbang			Persentase %		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gerokgak			5722			4420			76
Seririt			3924			2830			73
Busungbiu			1345			978			72
Banjar			4754			3607			70
Sukasada			5094			3886			76
Buleleng			6612			5322			80
Sawan			4000			3085			77



Kubutambahan			3561			2825			78
Tejakula			3968			2889			73
Kab. Buleleng			38.980			29.842			77

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng

Dari data tabel 5.3, pada tahun 2022 persentase Balita ditimbang 77%, namun tidak ada data terpilah Balita yang ditimbang. Ini berarti stakeholder terkait tidak memilah data Balita di timbang.

Tabel 5.4
Jumlah Bayi yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap

Kecamatan	2022		
	L	P	Jumlah
1	2	3	4
Gerokgak	693	691	1384
Seririt	539	567	1106
Busungbiu	250	247	497
Banjar	536	487	1023
Sukasada	662	634	1296
Buleleng	1117	1009	2126
Sawan	528	589	1117
Kubutambahan	478	470	948
Tejakula	429	401	830
Kab. Buleleng	5232	5095	10.327

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng

Dari data tabel 5.4, menampilkan pada tahun 2022 jumlah bayi laki yang mendapatkan Imunisasi dasar lengkap lebih banyak dari bayi perempuan. Ini menunjukkan ada ketimpangan gender pada jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap.

5.3 Peserta Keluarga Berencana

Peserta keluarga Berencana di Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 5.5

Tabel 5.5
Peserta Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng

Kecamatan	2022		
	L	P	Jumlah
1	2	3	4
Gerokgak	0	402	402
Seririt	9	3030	3039
Busungbiu	0	492	492



Banjar	26	1826	1852
Sukasada	95	1313	1408
Buleleng	57	2443	2500
Sawan	45	1409	1454
Kubutambahan	25	1718	1743
Tejakula	14	2220	2234
Kab. Buleleng	271	14.853	15.124

Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng

Dari data tabel 5.5, menampilkan pada tahun 2022 Peserta KB oleh laki-laki jauh lebih sedikit dari peserta KB perempuan, ini menandakan ada kesenjangan gender dalam keikutsertaan ber KB.

5.4 Gender Pada Tenaga Medis

Jumlah Dokter Umum di Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 5.6.

Tabel 5.6
Jumlah Dokter Umum di Kabupaten Buleleng

Kecamatan	2022		
	L	P	Jumlah
1	2	3	4
Gerokgak	5	2	7
Seririt	4	6	10
Busungbiu	5	1	6
Banjar	3	5	11
Sukasada	2	3	5
Buleleng	5	6	11
Sawan	1	5	6
Kubutambahan	3	4	7
Tejakula	3	2	5
Sub Jumlah	31	34	65
RSUD	15	11	26
RS Kertha Usada	11	13	24
RS Parama Sidhi	6	7	13
RS Balimed	5	7	12
RS Tk IV	5	15	20
RS KDH Bros	6	6	12
RS Santi Graha	5	1	6
RS Tangguwisia	8	6	14
RS Giri Emas	7	2	9
Sub Jumlah	68	68	136
Jumlah Buleleng	99	102	201



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng

Dari data tabel 5.6, menampilkan jumlah dokter umum laki-laki lebih sedikit dari dokter umum perempuan di kecamatan, namun perbedaannya tidak terlalu signifikan. Jumlah dokter umum di RS sama jumlahnya antara laki-laki dengan perempuan.

Jumlah Dokter Gigi di Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 5.7.

Tabel 5.7
Jumlah Dokter Gigi di Kabupaten Buleleng

Kecamatan	2022		
	L	P	Jumlah
1	2	3	4
Gerokgak	1	1	2
Seririt	0	3	3
Busungbiu	1	1	2
Banjar	0	2	2
Sukasada	1	2	3
Buleleng	2	5	7
Sawan	2	2	4
Kubutambahan	0	2	2
Tejakula	0	2	2
Sub Jumlah	7	20	27
RSUD	1	0	1
RS Kertha Usada	0	1	1
RS Parama Sidhi	0	1	1
RS Tk IV	1	1	2
RS Balimed	2	0	2
RS KDH Bros	0	0	0
RS Santi Graha	0	0	0
RS Pratama Tangguwisia	1	2	3
RS Giri Emas	1	1	2
Sub Jumlah	6	6	12
Jumlah Buleleng	13	26	39

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng

Dari data tabel 5.7, menampilkan jumlah dokter gigi umum laki-laki lebih sedikit dari dokter gigi perempuan di kecamatan dan jumlahnya cukup signifikan, sedangkan jumlah dokter gigi di RS jumlahnya sama, secara keseluruhan profesi dokter gigi di Kabupaten Buleleng ada ketimpangan gender, dengan dominasi perempuan.



Dari data gender terpilah di bidang kesehatan seperti yang disajikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pelayanan kesehatan kepada bayi dan Balita di Kabupaten Buleleng sudah terlaksana dengan baik, kesenjangan gender tidak signifikan.
2. Ada ketimpangan gender pada peserta Keluarga Berencana Aktif. Lebih banyak perempuan yang menjadi peserta Keluarga Berencana Aktif.
3. Ada ketimpangan gender pada profesi dokter. Dokter Umum dan Dokter Gigi didominasi oleh dokter perempuan.

Kondisi tersebut memerlukan pemberdayaan perempuan melalui Pengarusutamaan Gender. Perempuan perlu diberdayakan agar mengetahui hak dan kewajibannya dalam berumah tangga, termasuk dalam menentukan pilihan kepesertaan Keluarga Berencana Aktif. Perempuan juga perlu diberdayakan dalam mengembangkan potensinya memilih profesi.



BAB VI GENDER PADA BIDANG EKONOMI

Kinerja dari kegiatan pembangunan ekonomi menjadi salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan manusia (IPM) yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Selain sebagai salah satu komponen pembentuk IPM, kinerja dari kegiatan pembangunan ekonomi juga menjadi komponen pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender. Oleh karena itu kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi haruslah sensitive gender dalam artian perempuan dan laki-laki memperoleh kesetaraan dan keadilan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi.

Untuk mengenali apakah penyelenggaraan pembangunan ekonomi sudah sensitif gender atau tidak, maka diperlukan data terpilah terkait dengan penyelenggaraan pembangunan ekonomi sebagai berikut.

6.1 Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Buleleng Menurut Sektor

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Buleleng menurut sektor ekonomi disajikan pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Buleleng
Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2022

Sektor	Tahun 2022		
	L	P	Jumlah
1	2	3	4
Pertanian	89.656	62.834	152.490
Pertambangan/Penggalian	596	-	596



Industri Pengolahan	14.607	22.545	37.152
Listrik, Gas, dan Air	997	1.072	2.069
Konstruksi	25.051	1.749	26.800
Perdagangan, RM, Restoran dan perhotelan	35.772	46.600	82.372
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	17.041	14.253	31.294
Jasa Kemasyarakatan	18.671	14.582	33.253
Jasa Asuransi, Keuangan dan Persewaan	3.513	1.795	5.308
Jumlah	205.904	165.430	371.334

Sumber; Dinas Tenaga kerja Kabupaten Buleleng

Tabel 6.1 menampilkan ada kesenjangan gender dalam mata pencaharian penduduk di Kabupaten Buleleng, dengan dominasi laki-laki. Lebih banyak laki-laki yang memiliki mata pencaharian ketimbang perempuan. Namun, ada sejumlah mata pencaharian yang didominasi oleh perempuan yaitu, industri pengolahan, listrik, gas dan air, perdagangan, Rumah makan, Restoran dan perhotelan. Ini sejalan dengan adanya pandangan selama ini bahwa laki-laki bertugas mencari nafkah di sektor publik dan perempuan bertugas di sektor domestik mengurus rumah tangga. Walaupun perempuan bekerja di sektor publik maka ada stereotif pekerjaan yang dipandang cocok untuk perempuan

6.2 Kepemilikan Usaha

Kegiatan ekonomi di sektor formal yang berkembang di Bali umumnya dan juga di Kabupaten Buleleng adalah kegiatan ekonomi di sektor pariwisata, seperti kegiatan usaha hotel, restoran, dan bar.

Jumlah pemilik Hotel Melati disajikan pada tabel 6.2.

Tabel 6.2
Jumlah Pemilik Hotel Melati di Kabupaten Buleleng
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

Kecamatan	2022		
	L	P	Jumlah
1	2	3	4
Gerokgak	80	17	97
Seririt	49	26	75
Busungbiu	1	0	1



Banjar	101	36	137
Sukasada	32	19	51
Buleleng	108	35	143
Sawan	12	3	15
Kubutambahan	30	14	44
Tejakula	44	23	67
Jumlah	457	173	629

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng

Tabel 6.2 menampilkan ada kesenjangan gender pada pemilikan Hotel Melati di Kabupaten Buleleng. Pemilik Hotel Melati di Kabupaten Buleleng didominasi oleh laki-laki.

Jumlah pemilik Restoran disajikan pada tabel 6.3

Tabel 6.3
Jumlah Pemilik Restoran di Kabupaten Buleleng
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

Kecamatan	2022		
	L	P	Jumlah
1	2	3	4
Gerokgak	51	14	65
Seririt	16	8	24
Busungbiu	0	0	0
Banjar	50	12	62
Sukasada	28	8	35
Buleleng	90	40	130
Sawan	6	3	9
Kubutambahan	8	1	9
Tejakula	19	10	29
Jumlah	268	96	363

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng

Tabel 6.3 menampilkan ada kesenjangan gender pada pemilikan restoran di Kabupaten Buleleng. Pemilikan Restoran didominasi oleh laki-laki.

Jumlah pemilik Bar di Kabupaten Buleleng tahun 2022 disajikan pada tabel 6.4.

Tabel 6.4
Jumlah Pemilik Bar di Kabupaten Buleleng
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022



Kecamatan	2022		
	L	P	Jumlah
1	2	3	4
Gerokgak	6	2	8
Seririt	4	0	4
Busungbiu	0	0	0
Banjar	8	1	9
Sukasada	0	1	1
Buleleng	43	8	1
Sawan	0	0	0
Kubutambahan	0	0	0
Tejakula	0	3	3
Jumlah	61	15	76

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng

Tabel 6.4 menunjukkan ada kesenjangan gender dalam pemilikan Bar di Kabupaten Buleleng. Pemilika Bar didominasi oleh laki-laki.

6.3 Tenaga Kerja Indonesia

Salah satu kegiatan ekonomi yang menonjol bagi penduduk Bali pada umumnya dan termasuk juga penduduk Kabupaten Buleleng karena adanya pengaruh pariwisata adalah aktivitas sebagai tenaga kerja di luar negeri berkaitan dengan pariwisata yaitu sebagai tenaga kerja di kapal pesiar, tenaga kerja di restoran, tenaga kerja di hotel dan SPA. Tenaga kerja Indonesia Kabupaten Buleleng yang bekerja di luar negeri disajikan pada tabel 6.5.

Tabel 6.5
Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng di Luar Negeri
Menurut Negara Tujuan dan Jenis Kelamin Tahun 2021-2022

No	Nama Negara	Tahun 2021			Tahun 2022		
		L	P	Jml	L	P	Jml
1	Italia	374	53	427	432	53	485
2	Turki	11	253	264	63	338	401
3	New Zealand	-	-	-	50	3	53
4	India	-	-	-	-	-	-
5	Maldives	18	64	82	84	213	297
6	UAE	12	56	68	16	75	91
7	Rusia	-	33	33	2	80	82
8	Polandia	18	35	53	104	97	201



9	Sri Lanka	-	12	12	-	32	32
10	Cina	-	-	-	-	-	-
11	Macao	-	-	-	-	-	-
12	Qatar	11	4	15	46	38	84
13	Cyprus	-	6	6	1	21	22
14	Malaysia	-	-	-	4	-	4
15	Amerika Serikat (USA)	-	-	-	-	-	-
16	Bulgaria	-	-	-	4	5	9
17	Bahrain	-	-	-	1	5	6
18	Kepulauan Palau	-	-	-	-	-	-
19	Kongo	-	-	-	-	-	-
20	Nigeria	-	1	1	-	2	2
21	Oman	1	2	3	1	3	4
22	Uzbekistan	-	4	4	-	3	3
23	Yunani	-	-	-	-	-	-
24	Hungaria	-	1	1	-	2	2
25	Irak	-	-	-	-	-	-
26	Jerman	-	-	-	-	-	-
27	Kazakstan	-	-	-	-	3	3
28	Mauritius	-	-	-	-	8	8
29	Mesir	-	2	2	-	3	3
30	Moldova	-	-	-	-	-	-
31	Ukraina	-	3	3	-	-	-
32	Cuba	-	-	-	-	-	-
33	Brazil	-	-	-	-	-	-
34	Japan	-	-	-	85	23	108
35	Morocco	-	3	3	-	4	4
36	Korea	-	-	-	-	-	-
37	South Africa	-	-	-	-	-	-
38	Spanyol	-	-	-	-	-	-
39	Jordania	4	1	5	20	31	51
40	Papua New Guinea	-	-	-	-	-	-
41	Hongkong	-	-	-	-	-	-
42	Romania	-	9	9	-	18	18
43	Saudi Arabia	-	-	-	6	3	9
44	Serbia & Montenegro	-	2	2	4	3	7
45	Tanzania	-	-	-	-	2	2
46	Australia	-	-	-	-	-	-
47	Kroasia	-	-	-	-	-	-
48	Czech Republic	-	-	-	-	-	-
49	Denmark	-	-	-	-	-	-



50	Prancis	-	-	-	-	-	-
51	Kenya	-	-	-	-	1	1
52	Malta	-	-	-	-	1	1
53	Belanda	-	-	-	-	-	-
54	Panama	-	-	-	-	-	-
55	Portugal	-	-	-	-	-	-
56	Seychelles	-	-	-	-	2	2
57	Brunei Darussalam	-	-	-	-	2	2
58	Suriname	-	-	-	-	-	-
59	Kuwait	3	1	4	49	69	118
60	Namibia	-	-	-	-	-	-
61	Nevis Island	-	-	-	-	-	-
62	Singapura	-	-	-	-	-	-
63	Kepulauan Solomon	-	-	-	-	2	2
64	Lithuania	-	1	1	-	2	2
65	Dominica	-	-	-	-	-	-
66	South Korea	-	-	-	-	-	-
67	Albania	-	3	3	-	10	10
68	Belarus	-	-	-	-	1	1
69	Georgia	-	-	-	-	-	-
70	Slovakia	-	-	-	-	-	-
71	Haiti	-	-	-	-	-	-
72	Madagascar	-	-	-	-	-	-
73	Bahamas	2	-	2	-	-	-
74	Pakistan	-	1	1	-	-	-
75	Frenchi Polynesia	-	1	1	-	2	2
76	Mexico	-	2	2	-	2	2
77	Fiji Island	-	-	-	-	2	2
78	Gabon	-	-	-	-	3	3
79	Azerbaijan	-	-	-	43	3	46
80	United Kingdom	-	-	-	1	1	2
81	Bosnia & Herzegovina	-	-	-	1	1	2
82	Virgin Islands	-	-	-	-	2	2
83	Cook Islands	-	-	-	-	2	2
	Jumlah	454	553	1.007	1.017	1.176	2.193

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng

Dari data gender terpilah bidang ekonomi di Kabupaten Buleleng yang disajikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.



1. Ada kesenjangan gender pada mata pencaharian dengan dominasi laki-laki. Ada juga stereotip mata pencaharian yang dipandang cocok untuk perempuan.
2. Ada kesenjangan gender pada kepemilikan aset produktif dengan dominasi laki-laki.
3. Tenaga kerja ke luar negeri dari tahun 2021 sampai tahun 2022 masih didominasi perempuan.



BAB VII GENDER PADA BIDANG PEMERINTAHAN

Bidang pemerintahan yang mencakup legislatif, eksekutif, dan yudikatif memegang peranan penting dalam pembangunan. Sebelum keterlibatan masyarakat sipil yang semakin besar dalam pembangunan, pemerintah dapat dikatakan merupakan pelaku utama pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan hasil pembangunan. Sedemikian pentingnya peran pemerintah dalam pembangunan, maka personel pemerintah haruslah mewakili semua gender agar setiap pengambilan keputusan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pembangunan responsif gender. Berikut disajikan data terpilah personel pemerintah di Kabupaten Buleleng.

7.1 Gender Pada Catatan Sipil dan Kependudukan

Jumlah anak di registrasi di Kabupaten Buleleng tahun 2021 dan 2022 disajikan pada tabel 7.1

Tabel 7.1
Jumlah Anak di Registrasi Kabupaten Buleleng
Tahun 2021 - 2022

Kecamatan	2021			2022		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Gerokgak	4420	4192	8612	4680	4476	9156
Seririt	3718	3628	7346	3865	3760	7625
Busungbiu	1922	1721	3643	1950	1766	3716
Banjar	3303	2985	6288	3366	3095	6461
Sukasada	3822	3561	7383	3992	3707	7699



Buleleng	6145	5711	11.856	6421	5943	12.364
Sawan	3514	3318	6832	3673	3521	7194
Kubutambahan	3054	2940	5994	3184	3100	6284
Tejakula	3269	3144	6413	3319	3230	6549
Kab. Buleleng	33.167	31.200	64.367	34.450	32.598	67.048

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Buleleng

Tabel 7.1 menunjukkan ada kesenjangan gender dalam jumlah anak yang diregistrasi di Kabupaten Buleleng. Anak yang diregistrasi didominasi oleh laki-laki.

Jumlah siswa anak memiliki akta kelahiran di Kabupaten Buleleng tahun 2021 dan 2022 disajikan pada tabel 7.2

Tabel 7.2
Jumlah Anak Memiliki Akta Kelahiran Kabupaten Buleleng
Tahun 2021 - 2022

Kecamatan	2021			2022		
	Memiliki	Belum Memiliki	Jumlah	Memiliki	Belum Memiliki	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Gerokgak	29.734	377	30.111	29.830	305	30.135
Seririt	26.080	26	26.106	26.068	27	26.095
Busungbiu	13.742	8	13.750	13.695	13	13.708
Banjar	23.473	19	23.492	23.320	24	23.344
Sukasada	27.391	53	27.444	27.648	61	27.709
Buleleng	42.528	975	43.503	42.615	828	43.443
Sawan	24.133	387	24.520	24.380	216	24.596
Kubutambahan	21.029	419	21.448	21.180	343	21.523
Tejakula	22.162	426	22.588	22.203	381	22.584
Kab. Buleleng	230.272	2690	232.962	230.939	2.198	233.137

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Buleleng

Tabel 7.2 belum bisa menunjukkan ada kesenjangan gender dalam jumlah anak yang memiliki akta kelahiran di Kabupaten Buleleng. Anak yang memiliki akta kelahiran belum dipilah.

Jumlah anak mendapatkan kartu identitas anak (KIA) di Kabupaten Buleleng tahun 2021 dan 2022 disajikan pada tabel 7.3

Tabel 7.3
Jumlah Anak Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Buleleng
Tahun 2021 - 2022



Kecamatan	2021			2022		
	Memiliki	Belum Memiliki	Jumlah	Memiliki	Belum Memiliki	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Gerokgak	14.642	13.768	28.410	18.076	10.408	28.484
Seririt	13.378	11.113	24.491	16.158	8.350	24.508
Busungbiu	6.971	5.981	12.952	7.520	5.398	12.918
Banjar	11.987	10.023	22.010	12.637	9.275	21.912
Sukasada	8.971	16.847	25.818	11.664	14.399	26.063
Buleleng	18.875	22.004	40.879	21.746	19.219	40.965
Sawan	8.157	14.979	23.136	10.349	12.859	23.208
Kubutambahan	7.508	12.609	20.117	12.243	7.961	20.204
Tejakula	9.634	11.648	21.282	10.317	10.952	21.269
Kab. Buleleng	100.123	118.972	219.095	120.710	98.821	219.531

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buleleng

Tabel 7.3 belum bisa menunjukkan ada kesenjangan gender dalam jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Buleleng. Anak yang memiliki KIA belum dipilah.

Jumlah penduduk miskin kabupaten Buleleng Tahun 2022

Tabel 7.4
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Buleleng
Tahun 2022

Kecamatan	Tahun 2022				
	Jml Penduduk	L	P	Jml Pddk miskin	%
1	2	3	4	5	6
Gerokgak	103.008	2.220	331	2.551	2.5
Seririt	95.142	924	327	1.251	1.3
Busungbiu	53.553	809	124	933	1.7
Banjar	88.344	259	40	299	0.3
Sukasada	94.094	287	32	319	0.3
Buleleng	155.025	240	55	295	0.2
Sawan	85.569	41	7	48	0.1
Kubutambahan	74.157	470	59	529	0.7
Tejakula	79.089	268	39	307	0.4
Kab. Buleleng	827.981	5.518	1.014	6.532	0.8

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 7.4 menunjukkan adanya ketimpangan gender pada jumlah penduduk miskin Kabupaten tahun 2022, didominasi laki-laki.



Jumlah penyandang disabilitas Kabupaten Buleleng Tahun 2021 – 2022

Tabel 7.5

Jumlah penyandang disabilitas Kabupaten Buleleng Tahun 2021 – 2022

Kecamatan	2021					2022				
	Jml penduduk	L	P	Jumlah	%	Jumlah Penduduk	L	P	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8
Gerokgak	101.102	502	293	795	0.8	103.008	298	198	496	0.5
Seririt	96.662	356	262	618	0.6	95.142	252	203	455	0.5
Busungbiu	54.714	230	182	412	0.8	53.553	211	155	366	0.7
Banjar	89.316	268	215	483	0.5	88.344	236	198	434	0.5
Sukasada	92.961	369	256	625	0.7	94.094	166	97	263	0.3
Buleleng	154.767	288	221	509	0.3	155.025	230	167	397	0.3
Sawan	85.478	263	181	444	0.5	85.569	73	44	117	0.1
Kubutambahan	73.951	449	301	750	1.0	74.157	215	154	369	0.5
Tejakula	78.241	270	206	476	0.6	79.089	172	127	299	0.4
Kab. Buleleng	827.192	2.995	2.117	5.112	0.6	827.981	1.853	1.343	3.196	0.4

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 7.5 menunjukkan adanya ketimpangan gender pada jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Buleleng Tahun 2021 dan 2022 didominasi laki-laki. Adanya penurunan jumlah penyandang disabilitas dari (0,6%) tahun 2021 ke (0,4%) tahun 2022.

Jumlah penduduk ketunaan sosial dan penyimpangan prilaku Kabupaten Buleleng Tahun 2022 (Pengemis, Pemulung, Gelandangan, Napza, Bwblp, Pmbs, Tuna susila)

Tabel 7.6

Jumlah penduduk ketunaan sosial dan penyimpangan prilaku Kabupaten Buleleng Tahun 2022 (Pengemis, Pemulung, Gelandangan, Napza, Bwblp, Pmbs, Tuna susila)

Kecamatan	Tahun 2022				
	Jumlah Penduduk	L	P	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
Gerokgak	103.008	84	8	92	0.001
Seririt	95.142	52	17	69	0.001
Busungbiu	53.553	18	3	21	0.000
Banjar	88.344	58	9	67	0.001
Sukasada	94.094	19	3	22	0.000
Buleleng	155.025	35	1	36	0.000
Sawan	85.569	13	4	17	0.000
Kubutambahan	74.157	77	6	83	0.001
Tejakula	79.089	14	5	19	0.000
Kab. Buleleng	827.981	370	56	426	0.001



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 7.6 Menunjukkan adanya ketimpangan gender pada Jumlah penduduk ketunaan sosial dan penyimpangan prilaku Kabupaten Buleleng Tahun 2022 (Pengemis, Pemulung, Gelandangan, Napza, Bwblp, Pmbs, Tuna susila) karena Jumlah penduduk ketunaan sosial dan penyimpangan prilaku Kabupaten Buleleng Tahun 2022 didominasi laki-laki (Pengemis, Pemulung, Gelandangan, Napza, Bwblp, Pmbs, Tuna susila).

7.4 Gender Pada Legislatif dan Penyelenggara Pemilu

Tabel 7.4
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Buleleng
Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin

No	Partai Politik	2014-2019		
		L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	PDIP	13	2	15
2	Golkar	7	0	7
3	Gerindra	5	1	6
4	Demokrat	5	1	6
5	Hanura	6	0	6
6	Nasdem	2	2	4
7	PPP	1	0	1
	Jumlah	39	6	45

No	Partai Politik	2019-2024		
		L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	PDIP	14	4	18
2	Golkar	7	0	7
3	Gerindra	4	1	5
4	Nasdem	3	2	5
5	Hanura	5	0	5
6	Demokrat	2	1	3
7	PKB	1	0	1
8	Perindo	1	0	1
	Jumlah	37	8	45

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng

Tabel 7.4 menunjukkan adanya ketimpangan gender pada anggota DPRD Kabupaten Buleleng dengan dominasi laki-laki. Walaupun ada peningkatan jumlah perempuan anggota



DPRD Kabupaten Buleleng dari 6 perempuan pada periode 2014-2019 menjadi 8 perempuan pada periode 2019-2024, namun keterwakilan perempuan pada DPRD Kabupaten Buleleng tidak mencapai target 30% yang diharapkan.

Tabel 7.5
Jumlah Anggota Penyelenggara Pemilu Kabupaten Buleleng
Menurut Jenis Kelamin

No	Penyelenggara Pemilu	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	26	7	33
	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	35	10	45
	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	360	84	444
	Jumlah	421	101	522

Sumber: Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng

Tabel 7.5 menampilkan ada ketimpangan gender pada komisioner penyelenggara pemilu yaitu KPU Kabupaten Buleleng, dengan dominasi laki-laki baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa.

Tabel 7.6
Jumlah SDM Jajaran Pengawas Pemilu Kab. Buleleng
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Jenis SDM	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
	Kabupaten			
1	Komisioner	4	1	5
2	ASN	2	1	3
3	PPNPN	10	1	11
	Kecamatan			
5	Komisioner	25	2	27
6	ASN	21	6	27
7	PPNPN	26	19	45
	PKD	119	29	148
	Jumlah	207	59	

Sumber: Bawaslu Kab. Buleleng



Tabel 7.6 menampilkan ada ketimpangan gender pada SDM penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu Kabupaten Buleleng, dengan dominasi laki-laki baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa.

7.2 Gender Pada Aparatur Sipil Negara

Tabel 7.7
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Buleleng Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2021-2022

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Tahun 2021	3757	3559	7316
2	Tahun 2022	4136	4355	8491

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buleleng

Tabel 7.7 menunjukkan ada kesenjangan gender pada ASN Kabupaten Buleleng. Jumlah ASN laki-laki jauh lebih banyak ketimbang jumlah ASN perempuan tahun 2021, namun tahun 2022 jumlah ASN perempuan lebih banyak dari laki-laki, ini tentu merupakan hal yang menggembirakan dalam hal pengarusutamaan gender di Kabupaten Buleleng.

Tabel 7.8
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Buleleng
Menurut Tingkat Eselon dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	II.a	1	0	1
2	II.b	29	4	33
3	III.a	47	10	57
4	III.b	85	36	121
5	IV.a	101	53	154
6	IV.b	67	48	115
7	V.b	67	48	115
	Tahun 2021	330	151	481
	Tahun 2022	311	158	469

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buleleng



Tabel 7.8 menampilkan ada ketimpangan gender pada ASN Pemangku Jabatan di Kabupaten Buleleng, dengan dominasi laki-laki.

7.3 Gender Pada Instansi Vertikal di Kabupaten Buleleng

Tabel 7.9
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kantor Kementerian Agama Kab. Buleleng
Menurut Jenis Kelamin.

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Tahun 2021	183	196	379
2	Tahun 2022	179	191	370

Sumber: Kantor Kemenag Kab.Buleleng

Tabel 7.9 menampilkan ASN di Kantor kementerian Agama Kabupaten Buleleng, justru sudah menampilkan ASN perempuan sudah berimbang, bahkan lebih lebih besar baik di tahun 2021 maupun 2022.

Tabel 8.0
Jumlah Aparatur Sipil Negara Badan Pusat Statistik Kab. Buleleng
Menurut Jenis Kelamin.

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Tahun 2021	17	5	22
2	Tahun 2022	17	9	26

Sumber: BPS Kab.Buleleng

Tabel 8.0 menampilkan ada ketimpangan gender pada ASN Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, dengan dominasi laki-laki, baik di tahun 2021 maupun 2022. Meskipun ada peningkatan jumlah ASN di tahun 2022, namun masih setengah dari jumlah laki-laki.



Tabel 8.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kantor Pertanahan Kab. Buleleng
Menurut Jenis Kelamin.

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Tahun 2021	40	17	57
2	Tahun 2022	46	16	62

Sumber: Kantor Pertanahan Kab. Buleleng

Tabel 8.1 menampilkan ASN di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, Jumlah ASN laki-laki jauh lebih banyak ketimbang jumlah ASN perempuan di tahun 2021 maupun 2022.

Tabel 8.2
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kantor Pelayanan Pajak Pratama - Singaraja
Menurut Jenis Kelamin.

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Tahun 2021	43	31	74
2	Tahun 2022	38	36	74

Sumber: KPP Pratama-Singaraja

Tabel 8.2 menampilkan ada ketimpangan gender pada ASN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, dengan dominasi laki-laki, baik di tahun 2021 maupun 2022. Dari jumlah total 74 ASN yang masih sama tahun 2021 dengan 2022, namun ada peningkatan jumlah ASN perempuan di tahun 2022.

Tabel 8.3
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
-Singaraja Menurut Jenis Kelamin.

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Tahun 2021	24	11	35
2	Tahun 2022	20	8	28

Sumber: KPKNL-Singaraja



Tabel 8.3 menampilkan ada ketimpangan gender pada ASN KPKNL-Singaraja, dengan dominasi laki-laki, baik di tahun 2021 maupun 2022. ada penurunan jumlah ASN perempuan ditahun 2022.

Tabel 8.4
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kantor Pengadilan Negeri –Singaraja
Menurut Jenis Kelamin.

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Tahun 2021	33	14	47
2	Tahun 2022	31	18	49

Sumber: PN-Singaraja

Tabel 8.4 menampilkan ada ketimpangan gender pada ASN Pengadilan Negeri-Singaraja, dengan dominasi laki-laki, baik di tahun 2021 maupun 2022. Ada peningkatan jumlah ASN perempuan ditahun 2022.

Tabel 8.5
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kantor Kejaksaan Negeri –Buleleng
Menurut Jenis Kelamin.

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Tahun 2021	33	11	44
2	Tahun 2022	34	18	52

Sumber: Kejaksaan Negeri-Buleleng

Tabel 8.5 menampilkan ada ketimpangan gender pada ASN Kejaksaan Negeri-Buleleng, dengan dominasi laki-laki, baik di tahun 2021 maupun 2022. Ada peningkatan jumlah ASN perempuan ditahun 2022.

Tabel 8.6
Jumlah Anggota TNI AD Kodim 1609 Buleleng Menurut Pangkat Militer, Pendidikan
Terakhir dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Pangkat Tertinggi					Jumlah
		L	P	Perwira Tinggi	Perwira Menengah	Perwira Pertama	Bintara	Tamtama	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



1	Pasca sarjana	1	0	0	1	0	0	0	1
2	Sarjana	2	0	0	0	0	2	0	2
3	Diploma	1	0	0	0	1	0	0	1
4	SMA	226	0	0	1	10	190	0	226
5	SMP	23	0	0	0	0	18	25	23
6	SD	0	0	0	0	0	0	5	0
	Jumlah	253	0	0	2	11	210	30	253

Sumber: Komando Distrik Militer 1609/ Buleleng

Tabel 8.6 menunjukkan ada kesenjangan gender pada anggota TNI AD Kodim 1609 Buleleng. Seluruh anggota TNI AD Kodim 1609 Buleleng adalah laki-laki.

Tabel 8.7

Jumlah Anggota Kepolisian Resort Buleleng Menurut Pangkat Kepolisian Pendidikan Terakhir dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Pangkat Tertinggi					Jumlah
		L	P	Perwira Tinggi	Perwira Menengah	Perwira Pertama	Bintara	Tamtama	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pasca sarjana	14	0	0	4	7	3	0	14
2	Sarjana	228	6	0	3	36	195	0	234
3	Diploma	1	0	0	0	0	1	0	1
4	SMA	755	9	0	1	75	688	0	764
5	SMP	1	0	0	0	0	0	0	1
6	SD	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	999	15	0	8	118	888	0	1014

Sumber: Kepolisian Resort Buleleng

Tabel 8.7 menunjukkan ada kesenjangan gender pada anggota Kepolisian Resort Buleleng. Jumlah polisi laki-laki jauh lebih banyak ketimbang jumlah polisi wanita.

Dari data gender terpilah pada bidang pemerintahan yang disajikan di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Ada kesenjangan gender pada legislatif dan penyelenggara Pemilu di Kabupaten Buleleng. Jumlah anggota DPRD laki-laki di Kabupaten Buleleng jauh lebih banyak ketimbang jumlah anggota DPRD perempuan. Pada penyelenggara Pemilu di Kabupaten Buleleng kesenjangan gender mutlak. Komisioner KPU dan Bawaslu Buleleng sudah ada perempuannya namun masih didominasi laki-laki.



2. Kesenjangan gender pada ASN di Kabupaten Buleleng sudah tidak ada lagi, proporsi ASN perempuan sudah melampaui ASN laki-laki di tahun 2022, namun jumlah ASN yang memangku jabatan struktural didominasi oleh laki-laki, melebihi proporsi jumlah ASN perempuan.
3. Ada kesenjangan gender secara umum pada ASN Instansi Vertikal di Kabupaten Buleleng. Jumlah ASN laki-laki pada Instansi Vertikal di Kabupaten Buleleng jauh lebih banyak ketimbang jumlah ASN perempuan, kecuali ASN pada kantor Kementerian Agama kabupaten Buleleng.
4. Ada kesenjangan gender pada anggota TNI AD di Kabupaten Buleleng. Seluruh anggota TNI AD di Kodim 1609 Buleleng adalah laki-laki.
5. Ada kesenjangan gender pada anggota kepolisian Resort Buleleng. Jumlah Polisi laki-laki jauh lebih banyak ketimbang jumlah Polisi Wanita.

Keadaan itu memerlukan pemberdayaan perempuan melalui Pengarusutamaan Gender, agar perempuan mampu aktif berkiprah di bidang pemerintahan, dengan tidak menyalahi kodratnya.



BAB VIII ISU-ISU GENDER LAINNYA

Selain masalah gender yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa isu gender yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

8.1 Korban dan Pelaku Kekerasan

Data tahun 2022 menunjukkan korban kekerasan lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki. Ada 8 laki-laki dan 49 perempuan korban kekerasan yang menjadi korban. Sedangkan pelaku kekerasan 8 laki-laki dan 1 perempuan.

8.2 Gelandangan dan Pengemis

Data tahun 2022 Kabupaten Buleleng menunjukkan penduduk ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku termasuk pengemis, pemulung, gelandangan, Napza, Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (Bwblp), Pekerja migran bermasalah sosial (Pmbs), tuna susila didominasi oleh laki-laki (370) dan perempuan (56) orang dengan total 426 orang (0,001%) dari 827.981 orang jumlah penduduk.

8.3 Penduduk Lanjut Usia



Data tahun 2022 menunjukkan ada ketimpangan gender penduduk lanjut usia. Dari jumlah penduduk usia lanjut 81.838 ternyata lebih banyak perempuan penduduk lanjut usia 43.126 (52,7%) dibandingkan Penduduk lanjut usia laki-laki sebanyak 38.712 (47,3%).

8.4 Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Sensitif Gender

Infrastruktur dan Sarana-Prasarana di Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya sensitif gender. Infrastruktur di jalan, terminal, taman belum menyediakan fasilitas untuk disabilitas yang menggunakan kursi roda. Beberapa perkantoran yang dibangun baru sudah ada yang menyediakan jalur masuk kantor depan bagi yang menggunakan kursi roda. Ini contoh yang bagus infrastruktur yang sensitif gender. Sarana-Prasarana pelayanan publik belum sepenuhnya sensitif gender. Misalnya meja belajar di sekolah masih sama desainnya untuk laki-laki dan perempuan, meja belajar sensitif gender untuk perempuan perlu desain tertutup di bawah meja agar tempat duduk dan kaki murid perempuan tidak nampak dari depan. Demikian pula sarana-prasarana di perkantoran belum sensitif gender. Kalau kantor menyediakan ruangan khusus bagi perokok, mestinya juga bisa menyediakan ruang laktasi khusus bagi pegawai / pengunjung perempuan yang menyusui bayi.

8.5 Data Gender Terpilah Menurut Jenis Kelamin

Belum semua OPD menyajikan data gender terpilah. Walaupun sudah menyediakan data gender terpilah, namun belum semua data gender disajikan terpilah. Keadaan ini menjadi hambatan dalam melakukan analisis gender.

8.6 Regulasi Tentang Pengarusutamaan Gender

Sudah ada regulasi tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Buleleng yaitu Peraturan Daerah kabupaten Buleleng Nomor 2 tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender. Regulasi ini penting agar upaya Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Buleleng memiliki landasan yuridis yang kuat.



BAB IX PENUTUP

9.1 Simpulan

Profil Gender Data Terpilah Kabupaten Buleleng dipusatkan pada tiga sektor yaitu, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Tiga sektor itu penting karena indikator yang dipakai mengukur keberhasilan pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indeks komposit yang terdiri dari komponen pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Selain tiga sektor itu, Profil gender Data Terpilah ini juga menyajikan data sektor pemerintahan, karena aparat pemerintah merupakan penyelenggara pembangunan yang dibiayai oleh Negara. Di luar itu disajikan juga isu-isu gender yang belum tercakup pada sektor pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, dan sektor pemerintah.

Berdasarkan deskripsi profil gender pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pemerintah serta isu-isu gender lainnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Dari data gender terpilah di bidang pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut.
 - a. Ada kesenjangan gender pada jumlah siswa, APM, dan APK pada semua tingkat pendidikan di Kabupaten Buleleng dengan dominasi laki-laki.
 - b. Dilihat dari jumlah guru, pada tingkat pendidikan SD didominasi oleh guru laki-laki untuk guru ASN sedangkan guru non ASN didominasi oleh guru perempuan, pada tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung didominasi oleh guru laki-laki baik guru ASN maupun guru non ASN.
 - c. Guru bersertifikat pendidik didominasi oleh guru laki-laki.
 - d. Data gender terpilah menurut jenis kelamin tidak lengkap ketersediaannya.

Kondisi itu memerlukan pemberdayaan perempuan melalui Pengarusutamaan Gender. Upaya Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Buleleng tidak cukup dibebankan kepada Organisasi Pemerintah Daerah yang menangani pemberdayaan perempuan saja. Tetapi memerlukan dukungan regulasi di tingkat daerah dan dukungan otoritas yang lebih tinggi, serta partisipasi masyarakat.



2. Dari data gender terpilah di bidang kesehatan dapat disimpulkan sebagai berikut.
 1. Pelayanan kesehatan kepada bayi dan Balita di Kabupaten Buleleng sudah terlaksana dengan baik, meski masih ada yang belum memperoleh pelayanan, kesenjangan gender tidak signifikan.
 2. Ada ketimpangan gender pada peserta Keluarga Berencana Aktif. Lebih banyak perempuan yang menjadi peserta Keluarga Berencana Aktif, seolah ada eksploitasi terhadap perempuan dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana.
 3. Kesetaraan gender pada profesi dokter, Dokter Umum antara laki-laki dan perempuan sudah tidak ada perbedaan yang signifikan, sedangkan Dokter Gigi didominasi oleh dokter perempuan terutama yang di Puskesmas.

Kondisi tersebut memerlukan pemberdayaan perempuan melalui Pengarusutamaan Gender. Perempuan perlu diberdayakan agar mengetahui hak dan kewajibannya dalam berumah tangga, termasuk dalam menentukan pilihan kepesertaan Keluarga Berencana Aktif. Perempuan juga perlu diberdayakan dalam mengembangkan potensinya memilih profesi.

3. Dari data gender terpilah bidang ekonomi di Kabupaten Buleleng dapat disimpulkan sebagai berikut.
 1. Ada kesenjangan gender pada mata pencaharian dengan dominasi laki-laki. Ada juga stereotip mata pencaharian yang dipandang cocok untuk perempuan.
 2. Ada kesenjangan gender pada pemilikan aset produktif dengan dominasi laki-laki.
 3. Ada pergeseran sebagai tenaga kerja ke luar negeri dari dominasi perempuan tahun 2021 dan tahun 2022.

Kondisi itu memerlukan pemberdayaan perempuan melalui Pengarusutamaan Gender agar perempuan bisa mandiri memilih mata pencaharian, memiliki aset produktif tanpa tergantung pada pemberian laki-laki.

4. Dari data gender terpilah pada bidang pemerintahan dapat ditarik simpulan sebagai berikut.
 1. Ada kesenjangan gender pada legislatif dan penyelenggara Pemilu di Kabupaten Buleleng. Jumlah anggota DPRD laki-laki di Kabupaten Buleleng jauh lebih banyak ketimbang jumlah anggota DPRD perempuan. Pada penyelenggara Pemilu di Kabupaten Buleleng kesenjangan gender mutlak. Komisioner KPU dan Bawaslu Buleleng adalah di dominasi laki-laki.
 2. Ada kesenjangan gender pada ASN di Kabupaten Buleleng. Jumlah ASN laki-laki jauh lebih banyak ketimbang jumlah ASN Perempuan di tahun 2021, namun tahun 2022 ASN Perempuan sudah menggeser dominasi ASN laki-laki. Jumlah ASN yang memangku jabatan struktural didominasi oleh laki-laki, melebihi proporsi jumlah ASN perempuan.
 3. Ada kesenjangan gender pada ASN Instansi Vertikal di Kabupaten Buleleng. Jumlah ASN laki-laki pada Instansi Vertikal di Kabupaten Buleleng jauh lebih banyak ketimbang jumlah ASN perempuan.



4. Ada kesenjangan gender pada anggota TNI AD di Kabupaten Buleleng. Seluruh anggota TNI AD di Kodim 1609 Buleleng adalah laki-laki.
5. Ada kesenjangan gender pada anggota kepolisian Resort Buleleng. Jumlah Polisi laki-laki jauh lebih banyak ketimbang jumlah Polisi Wanita.

Keadaan itu memerlukan pemberdayaan perempuan melalui Pengarusutamaan Gender, agar perempuan mampu aktif berkiprah di bidang pemerintahan, dengan tidak menyalahi kodrat sebagai perempuan.

5. Isu gender lainnya yang menonjol, masih ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; data gender terpilah belum lengkap ketersediaannya; sudah ada regulasi tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Buleleng yang dipakai landasan yuridis dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender.

9.2 Rekomendasi

Berlandaskan pada sejumlah simpulan di atas, maka direkomendasikan beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai berikut.

1. Untuk mengatasi masih adanya persoalan dan kesenjangan gender di sektor pendidikan, maka perlu dibentuk kelompok kerja Pengarusutamaan gender bidang pendidikan. Selanjutnya mengaktifkan kelompok kerja mulai dari memilah data setiap tahun, menganalisis data terpilah untuk mengetahui ada atau tidaknya persoalan gender dan kesenjangan gender. Berdasarkan hasil analisis dibuat program kegiatan pengarusutamaan gender serta menyediakan anggarannya untuk mengatasi masalah atau kesenjangan gender.
2. Untuk mengatasi masih adanya persoalan dan kesenjangan gender di sektor kesehatan, supaya dibuat kelompok kerja Pengarusutamaan gender di bidang kesehatan. Selanjutnya kelompok kerja yang sudah terbentuk difungsikan dengan memilah data bidang kesehatan. Data terpilah kemudian dianalisis untuk mengetahui persoalan gender. Berdasarkan hasil analisis dibuat program kegiatan serta anggarannya untuk mengatasi masalah gender bidang kesehatan.
3. Untuk mengatasi masih adanya persoalan gender di bidang ekonomi, perlu dibuat kelompok kerja Pengarusutamaan gender di bidang ekonomi. Kelompok kerja yang sudah terbentuk difungsikan mulai dari memilah data di bidang ekonomi. Data terpilah selanjutnya dianalisis untuk mengetahui persoalan gender. Berdasarkan hasil analisis kemudian disusun program kegiatan beserta anggarannya untuk mengatasi persoalan gender di bidang ekonomi.
4. Untuk mengatasi masih adanya persoalan gender di sektor pemerintahan, perlu komitmen melakukan pengarusutamaan gender. Data gender terpilah di bidang pemerintahan sudah lengkap. Kesenjangan gender dengan dominasi laki-laki atas perempuan di semua unsur pemerintahan sudah jelas nampak. Tinggal disusun strategi dan ditetapkan komitmen untuk mewujudkan Pengarusutamaan Gender.
5. Untuk mengatasi isu-isu gender lainnya diperlukan komitmen mulai dari menyusun program kegiatan, menyediakan anggaran dan melaksanakan program kegiatan secara serius.
6. Profil Gender dengan Data Terpilah perlu dibuat setiap tahun secara berkesinambungan agar dapat ditemukeni keberadaan persoalan gender di Kabupaten Buleleng. Ketersediaan data sangat penting sebagai dasar penyusunan program kegiatan serta



pengambilan kebijakan dalam pembangunan pada umumnya dan penyusunan program kegiatan serta pengambilan kebijakan Pengarusutamaan Gender pada khususnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Irwan. (1997). *Sangkan Paran Gender*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Achmad, Sjamsiah. (1991). Teknik Analisis Gender (TAG). dalam Setyawati, Lugina. Anastasia Endang. (1991). *Pengembangan Studi Wanita Dan Pembangunan*. Jakarta: Proyek Studi Gender dan Pembangunan FISIP UI
- Schneiders, A. (1964). *Personal Adjustment and Mental Health*. New York: Rinehart & Winston.
- Fakih, M. (2006). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baron, A. R. (Alih bahasa Ratna Juwita). (2000). Psikologi Sosial. Bandung: Khazanah Intelektual.
- Canadian International Development Agency (CIDA), 1997. *“Guide to Gender-sensitive Indicators”*.
- Debbie Budlender, Diane Elson, Guy Hewitt and Tanni Mukhopadhyay, 2002. *Understanding Gender Responsive Budgets*.
- “Gender, Law, and Policy in ADB Operations: A Tool Kit (2006)*. Asian Development Bank.
- Dinas PPKBPP-PA Kabupaten Buleleng, 2017, *Statistik Gender Kabupaten Buleleng*, Singaraja: Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2008, *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Daerah*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2008, *Harmonisasi Konsep dan Definisi Gender untuk Aplikasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.
- Pusat Kajian Gender Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2007, *Hak Asasi Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Raharjo, Yulfita. 1991, “Perbedaan Antara Studi Wanita Dalam Pembangunan Dan Studi Wanita” dalam Setyawati, Lugina. Anastasia Endang, *Pengembangan Studi Wanita Dan Pembangunan*. Jakarta: Proyek Studi Gender dan Pembangunan FISIP UI.
- Rahmawati, A. 2004, Persepsi Remaja tentang Konsep Maskulin dan Feminim Dilihat dari Beberapa Latar Belakangnya. Skripsi pada Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan UPI Bandung: Tidak diterbitkan.



Rinusu (Ed), 2007, *Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Indonesia: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan United National Development Program (UNDP).

Santrock, J. W. (2002). *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup*. Jakarta: Erlangga.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita serta Penjelasannya.

Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Kepmendagri No.15/2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender.